



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Alamat : Jl. Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Nomor Telepon : (061) 80024154 Faks.(061) 7955895

Website : perizinan.deliserdangkab.go.id

E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, capaian indikator kinerja, analisis pencapaian sasaran, serta evaluasi dan tindak lanjut perbaikan kinerja. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan akuntabel mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPPTSP, khususnya dalam peningkatan investasi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang secara berkelanjutan.

Lubuk Pakam, Februari 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG



A. FITRIYAN SYUKRI, SSTP., M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19840715 200312 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.2 Anggaran.....	9
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	10
1.4 Dasar Hukum.....	12
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	35
3.1.1 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi.....	36
3.1.2 Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	37
3.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	40
3.2 Capaian Kinerja.....	42
3.2.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan.....	43

3.2.2	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	54
3.2.3	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	59
3.2.4	Analisis Penyebab KeberhasilaKegagalan atau Peningkatan/ /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.....	61
3.2.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.2.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Inerja.....	74
3.2.7	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Inspektorat Tahun 2025.....	81
3.3	Realisasi Anggaran.....	82

BAB IV PENUTUP..... 89

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Stuktur Organisasi.....	4
------------------------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Investasi Tahun 2023-2025 Kab. Deli Serdang.....	46
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang.....	5
Tabel 1.2	Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025.....	6
Tabel 1.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	9
Tabel 1.4	Perumusan Keterkaitan Isu Strategis dengan Sasaran Kinerja.....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2026.....	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	21
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang.....	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang.....	28
Tabel 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Deli Serdang.....	28
Tabel 3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	36
Tabel 3.2	Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara TW.I s/d TW.IV Tahun 2025 Berdasarkan Lokasi.....	49
Tabel 3.3	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	53
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja.....	54
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.....	58
Tabel 3.7	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	61
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	61
Tabel 3.9	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Dinas PMPTSP Kab.Deli Serdang Tahun 2025.....	65

Tabel 3.10 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Kab.Deli Serdang 2025.....	68
Tabel 3.11 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perrangkat Daerah Dinas PMPTSP Kab.Deli Serdang Tahun 2025.....	71
Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran, Tujuan & Sasaran.....	73
Tabel 3.13 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Prograam & Kegiatan.....	74
Tabel 3.14 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Inspektorat Tahun 2025.....	81
Tabel 3.15 Capaian Anggaran Program & Kegiatan.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kinerja perangkat daerah perlu direncanakan, diukur, dan dilaporkan secara sistematis sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah dan masyarakat.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran, indikator kinerja, realisasi anggaran, serta analisis keberhasilan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 untuk menyajikan capaian

pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat pencapaian sasaran strategis, serta efektivitas penggunaan anggaran selama tahun 2025. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan kinerja, dan dasar pengambilan kebijakan pada periode berikutnya.

Penyusunan LkjiP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas :

Membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

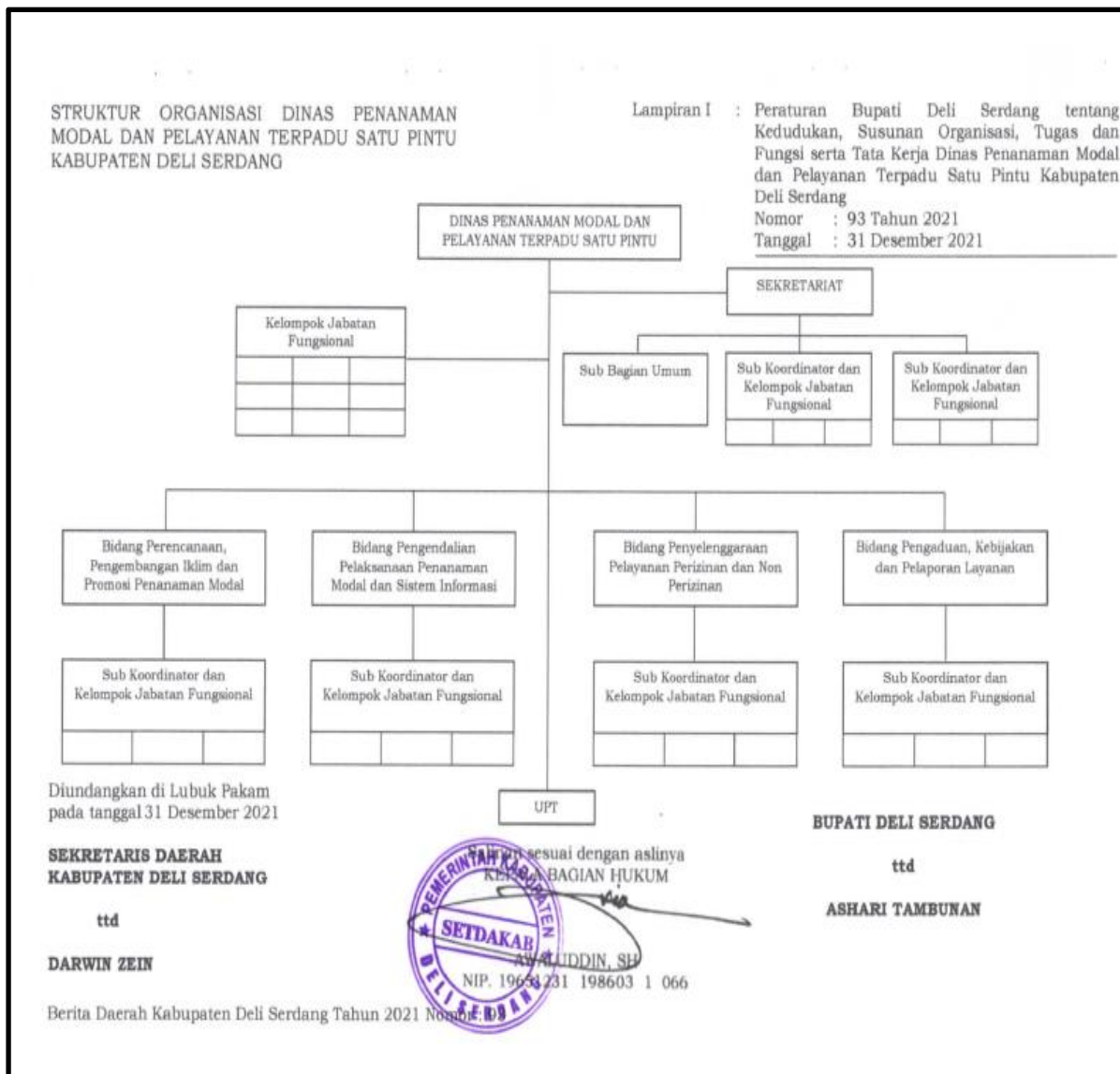
- o Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o Pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o Pembinaan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG



Sumber : Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021.

Sumber Daya (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Formasi jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan kepegawaian dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang

No.	Jabatan	Gol/Eselon	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Kepala Dinas	IV/c (Es. II)	S1	1
2.	Sekretaris	IV/b (Es. III)	S2	1
3.	Kasubbag Umum	III/d (Es. IV)	S2	1
4.	Perencana Ahli Muda	III/d (Es. IV)	S1	1
5.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	(Es. IV)	-	-
6.	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	III/d (Es. III)	S1	1
7.	Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	IV/a (Es. III)	S1	1
8.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	III/d (Es. III)	S1	1
9.	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	III/d (Es. III)	S2	1
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	III/c/ III/d (Es. IV)	SMA, S1, S2	11
11.	Staf (ASN)	III	SMK, D3, S1	22
12.	Staf (ASN)	II	SMK	2
13.	Non ASN		SMK, D3, S1, S2	43
Jumlah Seluruh Pegawai DPMPTSP				86

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Aset dan Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perlengkapan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk merealisasikan visi dan misinya, Saranan dan prasarana/perlengkapan kantor sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kab. Deli Serdang Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG	KET
1.	AC Split	41 Unit	Baik	
2.	Alat Pemadam Kebakaran	5 Unit	Baik	
3.	Alat Pengaman (Finger Print Lock Doorl)	8 Unit	Baik	
4.	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Baik	
5.	Alat Penyaringan (Saringan Air/Water Filter)	2 Unit	Baik	
6.	Alat Permainan (Permainan Anak-Anak)	1 Unit	Baik	
7.	Camera + Attachment	2 Unit	Baik	
8.	Camera Electronic	1 Unit	Baik	
9.	Camera Video	3 Unit	Baik	
10.	CCTV	3 Unit	Baik	
11.	Copy Board/Elektrik White Board (Elektric Banner)	3 Unit	Baik	
12.	CPU	2 Unit	Baik	
13.	Crimping Tool	2 Unit	Baik	
14.	Dispenser	1 Unit	Baik	
15.	Exhause Fan	3 Unit	Baik	
16.	Facsimile	3 Unit	Baik	
17.	Filling Besi/Metal	17 Unit	Baik	
18.	Global Positioning System (GPS)	3 Unit	Baik	
19.	Handycam	1 Unit	Baik	
20.	Harddisk Eksternal	13 Unit	Baik	
21.	Harddisk Internal	5 Unit	Baik	
22.	Hub	3 Unit	Baik	
23.	Karpet	2 Unit	Baik	
24.	Kendaraan Dinas Roda 2 (Sepeda Motor)	1 Unit	Baik	
25.	Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Dinas)	6 Unit	Baik	
26.	Keyboard	4 Unit	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG		KONDISI BARANG	KET
27.	Kipas Angin	1	Unit	Baik	
28.	Kompas	2	Unit	Baik	
29.	Kotak Alat (Kotak Tempat Racun Api)	4	Unit	Baik	
30.	Kursi Besi	10	Unit	Baik	
31.	Kursi Besi/Metal	100	Unit	Baik	
32.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	Unit	Baik	
34.	Kursi Putar	23	Unit	Baik	
35.	Kursi Rapat	100	Unit	Baik	
36.	Kursi Roda	1	Unit	Baik	
37.	Kursi Tamu	6	Unit	Baik	
38.	Laptop	33	Unit	Baik	
39.	Lemari Besi	46	Unit	Baik	
40.	Lemari Gantung	1	Unit	Baik	
41.	Loudspeaker	2	Unit	Baik	
42.	Meja Bayi	1	Unit	Baik	
43.	Meja Biro	14	Unit	Baik	
44.	Meja Kerja	52	Unit	Baik	
45.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	Baik	
46.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	Unit	Baik	
47.	Meja Komputer	3	Unit	Baik	
48.	Meja Rapat	2	Unit	Baik	
49.	Memory	10	Unit	Baik	
50.	Mesin Absensi	2	Unit	Baik	
51.	Mesin Calculator	3	Unit	Baik	
52.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	1	Unit	Baik	
53.	Mesin Hitung Elektronik	1	Unit	Baik	
54.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Unit	Baik	
55.	Mesin Pompa Air	2	Unit	Baik	
56.	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik	
57.	Meteran (Meteran Laser Digital)	6	Unit	Baik	
58.	Monitor	14	Unit	Baik	
59.	Note Book (Tablet)	2	Unit	Baik	
60.	P.C Unit/ Komputer PC	28	Unit	Baik	
61.	Papan Data (Papan Mading)	2	Unit	Baik	
62.	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Unit	Baik	
63.	Papan Pengumuman (Bingkai Maklumat)	1	Unit	Baik	
64.	Peralatan Jaringan Lain-lain	16	Unit	Baik	
65.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain (Server)	1	Unit	Baik	
66.	Personal Komputer Lain-lain (PC All In One)	15	Unit	Baik	
67.	Peti Uang (Brankas)	1	Unit	Baik	
68.	Plang	2	Unit	Baik	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG		KONDISI BARANG	KET
69.	Plang Tanda Kepemilikan	1	Unit	Baik	
70.	Printer	41	Unit	Baik	
71.	Rak TV	1	Unit	Baik	
72.	Rak-rak Penyimpanan (Rak Arsip)	25	Unit	Baik	
73.	Scanner	11	Unit	Baik	
74.	Server	1	Unit	Baik	
75.	Slide Projector (Lapangan)	1	Unit	Baik	
76.	Sofa	8	Unit	Baik	
77.	Sound Monitor/Sirine (Monitor antrian lengkap)	1	Unit	Baik	
78.	Sound System	2	Unit	Baik	
79.	Stabilisator	1	Unit	Baik	
80.	Switch Hub	1	Unit	Baik	
81.	Tandon Air	2	Unit	Baik	
82.	Tangga	1	Unit	Baik	
83.	Televisi	9	Unit	Baik	
84.	Tempat Sampah	10	Unit	Baik	
85.	Tripod Camera	2	Unit	Baik	
86.	UPS	26	Unit	Baik	
87.	White Board	2	Unit	Baik	
88	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Kantin)	1	Unit	Baik	
89	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	Baik	
90	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola)	1	Unit	Baik	
91	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (Bangunan Tower)	1	Unit	Baik	
92	Gapura	1	Unit	Baik	
93	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	Baik	
94	Instalasi Listrik	1	Buah	Baik	
95	Konstruksi Pagar	3	Unit	Baik	
96	Media Reklame (Baliho Neon Box uk. 4x6 M)	1	Buah	Baik	
97	Parkir	2	Unit	Baik	
98	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen (Rumah Dinas)	1	Unit	Baik	
99	Sumur dengan Pompa	2	Buah	Baik	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang

1.2.2 Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang didukung oleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai belanja operasional, pelayanan perizinan, fasilitasi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta dukungan administrasi perkantoran.

Perbandingan alokasi anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 1.3

Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2024	Rp. 12.769.037.561,-
APBD	Tahun 2025	Rp. 12.880.715.873,-

Sumber : DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dan 2025.

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pencapaian hasil masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam mendorong akselerasi pertumbuhan investasi daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan mendasar yang berkaitan dengan efektivitas pengembangan iklim investasi dan mutu pelayanan perizinan.

Pada aspek investasi, realisasi penanaman modal belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan data potensi dan peluang investasi, belum maksimalnya promosi daerah, serta masih perlunya penguatan pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal. Hal ini berdampak pada belum meratanya pertumbuhan investasi serta belum optimalnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah.

Pada aspek pelayanan publik, tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan peningkatan integrasi pelayanan berbasis elektronik (OSS-RBA), penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan yang ramah masyarakat termasuk kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan perizinan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis perangkat daerah difokuskan pada penguatan iklim penanaman modal, optimalisasi promosi investasi, peningkatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta peningkatan

kualitas pelayanan perizinan. Penanganan isu tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pelayanan Penanaman Modal, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berikut ini perumusan isu strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan rencana kinerja dan penetapan target kinerja perangkat daerah :

Tabel 1.4

Perumusan Keterkaitan Isu Strategis dengan Sasaran Kinerja

Isu Strategis	Sasaran Kinerja	Indikator	Program (sesuai DPA)
Belum optimalnya iklim dan informasi potensi investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Promosi investasi belum maksimal			Program Promosi Penanaman Modal
Pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha belum optimal			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kualitas dan integrasi pelayanan perizinan perlu ditingkatkan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Nomor 67.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pealyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memastikan keterkaitan antara tujuan pembangunan daerah, program perangkat daerah, serta hasil yang ingin dicapai secara terukur. Perencanaan disusun secara sistematis agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dokumen perencanaan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan. Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Penjabaran rencana strategis tahunan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang memuat komitmen antara Kepala Dinas dengan Bupati terhadap pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja tersebut diturunkan secara berjenjang kepada sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional, sehingga setiap unit kerja memiliki target yang jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran perangkat daerah.

Perencanaan kinerja Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada peningkatan investasi daerah, perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja. Sasaran dan indikator kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar

capaian kinerja dapat diukur dan dievaluasi secara objektif pada akhir periode pelaporan.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dicapai. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program pada tingkat perangkat daerah.

Rencana Strategis disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang serta kebijakan nasional dan provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan publik. Penyelarasan tersebut menjaga konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Strategis memuat penetapan tujuan dan sasaran yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai selama periode perencanaan, disertai indikator kinerja yang terukur dan target capaian tahunan. Sasaran strategis difokuskan pada peningkatan nilai investasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan Perjanjian Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis perangkat daerah. Keterpaduan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2025 - 2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Investasi		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	4.375.389,83 (Rp.Juta)	4.444.918,48 (Rp.Juta)
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5,00 %	6,00 %
2	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai LHE AKIP	80,01	80,02
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80,01	80,02
3	Meningkatkan pelayanan prima pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	85

Sumber : Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Periode 2025-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator ini menggambarkan hasil utama yang ingin diwujudkan serta menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara mandat urusan pemerintahan, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis, serta prioritas pembangunan daerah. Setiap indikator dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara objektif.

Indikator Kinerja Utama difokuskan pada hasil pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan publik, antara lain peningkatan nilai investasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran indikator dilakukan secara periodik melalui pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan serta menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja pada akhir tahun pelaporan. Uraian Indikator Kinerja Utama beserta target capaian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persen (%)	Indikator kinerja sasaran strategis ini untuk mengetahui capaian pertumbuhan realisasi investasi.	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun n (Tahun Berjalan) dikurangi nilai investasi PMDN dan PMA Tahun n-1 (Tahun Lalu) dibagi nilai investasi PMDN dan PMA Tahun n-1 (Tahun Lalu) dikali 100 persen.	Laporan Realisasi Investasi dari Kementrian Investasi / BKPM dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara	
2.	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara publik melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 80% penerima layanan, dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 indikator penilaian, dengan mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu : 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 4) Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan, 9) Sarana dan Prasarana.	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kab. Deli Serdang	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
3.	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	LHE-AKIP	Poin	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67A Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan dalam pengelolaan AKIP Kabupaten Deli serdang,dalam lingkup perencanaan kinerja pengukuran kinerja,capaian kinerja,evaluasi kinerja dan pelaporan.	Akumulasi Penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dengan Rincian : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 5. Capaian Kinerja.	Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Tahun 2024

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian Tahun Anggaran 2025. Rencana ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu periode anggaran serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan dokumen penganggaran daerah. Setiap program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis.

Target kinerja dirumuskan secara kuantitatif dan terukur agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Penetapan target mempertimbangkan kapasitas sumber daya, pagu anggaran, serta kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target tahunan diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Rencana kinerja Tahun Anggaran 2025 selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang memuat komitmen pencapaian target antara Kepala Dinas dengan Bupati, serta diturunkan secara berjenjang kepada seluruh unit kerja. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja selama tahun berjalan.

Uraian rencana kinerja beserta target capaian Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5,00 %
2.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80,01 Nilai
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;	80,01	Nilai	11.295.552.273
	2. Manajemen Risiko Indeks	3,3	Indeks	
	3. IKM Perangkat Daerah	83	Poin	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	%	130.922.780
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.574.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	14.581.340
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	14.581.340
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	14.226.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	14.146.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1	Dokumen	21.812.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	%	9.053.156.825
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	Orang/bulan	8.691.251.425

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	347.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	14.205.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	%	47.300.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86	Paket	47.300.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	%	514.009.596
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4.050.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	253.786.751
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	60.160.768
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	53.737.393
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16	Dokumen	5.433.494
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	23.497.390
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	113.343.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	15.044.000

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	15.044.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100	%	1.213.641.672
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	360.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	608.115.168
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	21.870.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	583.296.504
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100	%	321.477.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	Unit	250.588.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	48.319.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37	Unit	22.570.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	%	219.372.400
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100	%	219.372.400
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	112.204.400

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	107.168.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	%	77.898.700
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100	%	77.898.700
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	47.994.900
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi promosi penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	29.903.800
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%	943.261.500
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal	100	%	943.261.500
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.000	Pelaku Usaha	906.430.800
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	320	Pelaku Usaha	36.830.700
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	%	110.954.800

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%	110.954.800
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	Kegiatan Usaha	13.038.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	Pelaku Usaha	91.570.800
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25	Kegiatan Usaha	6.346.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	233.676.200
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	233.676.200
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	Dokumen	233.676.200
JUMLAH				12.880.715.873

Sumber : Rencana Kerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat komitmen pencapaian kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dengan Bupati Deli Serdang. Dokumen ini menegaskan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang harus dicapai pada akhir periode pelaporan.

Perjanjian Kinerja tidak memuat rincian kegiatan, tetapi menitikberatkan pada hasil atau outcome yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan, seperti peningkatan nilai investasi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja dirumuskan secara terukur dan realistis agar capaian dapat dievaluasi secara objektif.

Penjabaran Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang kepada sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, pejabat fungsional, dan pelaksana melalui penetapan target kinerja unit kerja dan individu. Penjenjangan tersebut memastikan keselarasan antara kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Capaian Perjanjian Kinerja dipantau melalui monitoring dan evaluasi secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil evaluasi menjadi dasar pengendalian pelaksanaan program serta bahan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.

Uraian sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5,00 %
2.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80,01 Nilai
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

Tabel 2.6

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;	71	Nilai	11.295.552.273
	2. Manajemen Risiko Indeks	3,3	Indeks	
	3. IKM Perangkat Daerah	87,25	Poin	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	%	130.922.780
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	51.574.300

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	14.581.340
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	14.581.340
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	14.226.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	14.146.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1	Dokumen	21.812.700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	%	9.053.156.825
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	Orang/bulan	8.691.251.425
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	347.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	14.205.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	%	47.300.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86	Paket	47.300.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	%	514.009.596

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4.050.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	253.786.751
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	60.160.768
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	53.737.393
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16	Dokumen	5.433.494
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	23.497.390
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	113.343.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	15.044.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	15.044.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100	%	1.213.641.672
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	360.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	608.115.168
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Laporan	21.870.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	583.296.504

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100	%	321.477.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	Unit	250.588.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	48.319.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37	Unit	22.570.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	%	219.372.400
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100	%	219.372.400
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	112.204.400
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	1	Dokumen	107.168.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100	%	77.898.700
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100	%	77.898.700
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	47.994.900
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	29.903.800
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	%	943.261.500

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal	100	%	943.261.500
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.000	Pelaku Usaha	906.430.800
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	320	Pelaku Usaha	36.830.700
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	%	110.954.800
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%	110.954.800
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	Kegiatan Usaha	13.038.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	Pelaku Usaha	91.570.800

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
		K		Rp
1	2	3		4
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25	Kegiatan Usaha	6.346.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	233.676.200
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	233.676.200
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	Dokumen	233.676.200
JUMLAH				12.880.715.873

Sumber : DPPA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan secara terukur dan sistematis. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui penyajian informasi kinerja yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan transisi dan merupakan penjabaran dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2026. Dokumen tersebut menjadi dasar penetapan sasaran, indikator, target kinerja, serta arah kebijakan perangkat daerah.

Selanjutnya, target kinerja tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang kemudian diukur dan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan keterkaitan tersebut, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berada dalam satu kesatuan sistem yang selaras dan konsisten.

Bab ini menyajikan kerangka pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja, perbandingan antara target dan realisasi, serta analisis atas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja menjadi instrumen utama dalam menilai tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2026 yang merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2026. Sasaran, indikator, dan target kinerja selanjutnya diturunkan ke dalam Rencana Kerja serta Perjanjian Kinerja sebagai dasar pengukuran tahunan.

Pendekatan yang digunakan adalah *result-based performance*, yaitu pengukuran yang berorientasi pada hasil (outcome). Dengan pendekatan ini, keberhasilan perangkat daerah tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dihasilkan, seperti meningkatnya investasi, membaiknya tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5,00 %
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP	80,01 Nilai
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin

Untuk memberikan kejelasan metode pengukuran, masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi

Indikator persentase pertumbuhan realisasi investasi digunakan untuk mengukur peningkatan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai outcome utama pelaksanaan fungsi fasilitasi penanaman modal. Pertumbuhan investasi mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, promosi potensi daerah, pembinaan pelaku usaha, serta pengawasan realisasi investasi.

Sumber data diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Formula perhitungan:

$$\text{Pertumbuhan Investasi (\%)} = ((\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1) \div \text{Realisasi Tahun } n-1) \times 100\%$$

Interpretasi:

- Nilai positif menunjukkan peningkatan investasi;
- Nilai sesuai atau melebihi target menunjukkan kinerja berhasil;
- Nilai di bawah target menjadi dasar evaluasi kebijakan promosi dan fasilitasi investasi.

3.1.2 Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP)

Pengukuran kinerja pada aspek tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui indikator Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP). Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kematangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

Nilai LHE AKIP mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, keselarasan program dan anggaran, kejelasan indikator kinerja, efektivitas pengukuran, ketepatan pelaporan, serta keberlanjutan tindak lanjut hasil evaluasi. Dengan demikian, indikator ini menggambarkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan orientasi hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran indikator dilakukan melalui tahapan:

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten/BPKP/Kementerian PANRB;
2. Penilaian terhadap komponen SAKIP meliputi:
 - perencanaan kinerja
 - pengukuran kinerja
 - pelaporan kinerja
 - evaluasi internal
 - capaian kinerja
3. Pemberian skor numerik dan predikat;
4. Penetapan nilai akhir dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Formula Perhitungannya :

Nilai indikator LHE AKIP Perangkat Daerah = Skor hasil evaluasi resmi LHE KIP yang ditetapkan oleh evaluator (Inspektorat)

Nilai LHE- AKIP = 1+2+3+4

- 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%): Menilai dokumen seperti Renstra, Renja, RKT, dan Perjanjian Kinerja. Kualitasnya dilihat dari kejelasan tujuan, keselarasan, dan integrasi.*
- 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%): Mengukur pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja melalui perbandingan realisasi dengan target serta penetapan indikator yang tepat.*
- 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%): Menilai transparansi dan akurasi laporan kinerja (LKjIP) serta publikasinya kepada masyarakat.*
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%): Menilai sejauh mana instansi mengevaluasi diri sendiri (oleh Inspektorat) dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan.*

Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Penilaian dilakukan

oleh evaluator independen sesuai pedoman evaluasi SAKIP dan dinyatakan dalam bentuk skor numerik dengan rentang 0 sampai dengan 100.

Skor tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam predikat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat AA menunjukkan implementasi manajemen kinerja yang sangat efektif dan berorientasi hasil, sedangkan predikat A dan BB mencerminkan kualitas tata kelola yang sangat baik dan baik. Predikat B hingga CC menunjukkan perlunya penguatan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, sementara predikat C dan D mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas belum berjalan secara memadai.

Interpretasi Nilai LHE AKIP (resmi sesuai PermenPANRB 88/2021) dinyatakan dalam skor 0–100 dan diklasifikasikan dalam predikat kinerja sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat	Interpretasi
≥ 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	Sistem manajemen kinerja sangat efektif, terintegrasi penuh, outcome nyata
≥ 80 – < 90	A (Memuaskan)	Implementasi SAKIP sangat baik, hasil kinerja tinggi, efisien
≥ 70 – < 80	BB (Sangat Baik)	Sistem berjalan baik, masih perlu penguatan pada beberapa aspek
≥ 60 – < 70	B (Baik)	Implementasi cukup baik, namun masih terdapat kelemahan mendasar
≥ 50 – < 60	CC (Cukup)	Banyak komponen belum optimal, perlu perbaikan signifikan
≥ 30 – < 50	C (Kurang)	Sistem akuntabilitas belum berjalan efektif
< 30	D (Sangat Kurang)	Akuntabilitas kinerja sangat lemah

3.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Indikator ini merepresentasikan persepsi langsung masyarakat atas mutu layanan yang diterima, sehingga menjadi tolok ukur outcome pelayanan publik sekaligus cerminan keberhasilan perangkat daerah dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Secara karakteristik, IKM termasuk indikator berbasis persepsi (perception-based indicator) yang bersifat kuantitatif, terukur, objektif, dan komparatif. Nilainya diperoleh melalui penilaian langsung dari pengguna layanan, sehingga mampu menggambarkan kualitas pelayanan dari sudut pandang masyarakat, bukan semata-mata dari sisi penyelenggara. Hasil pengukuran IKM dapat digunakan sebagai dasar evaluasi internal, perbandingan kinerja antar waktu, serta bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Pengukuran IKM dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap responden pengguna layanan perizinan dan nonperizinan dengan menggunakan instrumen kuesioner terstandar. Penilaian mencakup unsur-unsur pelayanan publik yang meliputi: persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Setiap unsur dinilai menggunakan skala persepsi 1 sampai dengan 4, dengan kategori:

- 1 = tidak baik,
- 2 = kurang baik,
- 3 = baik,
- 4 = sangat baik.

Nilai masing-masing unsur dihitung sebagai rata-rata skor responden, kemudian dikonversi ke dalam skala 25–100 agar mudah diinterpretasikan. Adapun formula perhitungan IKM adalah sebagai berikut:

$$\text{IKM} = (\text{Total Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan} \div \text{Jumlah Unsur}) \times 25$$

atau secara sederhana:

$$\text{IKM} = \text{Nilai rata-rata persepsi} \times 25$$

Hasil pengukuran selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan klasifikasi mutu pelayanan sebagai berikut:

- ✧ 88,31–100,00 : Sangat Baik;
- ✧ 76,61–88,30 : Baik;
- ✧ 65,00–76,60 : Cukup;
- ✧ ≤ 64,99 : Kurang.

Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan dan semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat. Sebaliknya, nilai yang lebih rendah menunjukkan perlunya perbaikan pada unsur pelayanan tertentu. Dengan demikian, IKM berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pengukuran IKM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan evaluasi kinerja pelayanan publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengatur metodologi, unsur, dan tata cara perhitungan indeks, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat yang menegaskan pelaksanaan survei secara berkala sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, pengukuran IKM dilaksanakan secara sistematis, terstandar, dan akuntabel sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai indikator kinerja pelayanan dalam dokumen LKjIP.

3.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran strategis perangkat daerah yang diukur melalui indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan antara target dan realisasi, serta dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas strategi, efisiensi penggunaan sumber daya, konsistensi tren capaian antarperiode, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan pencapaian kinerja.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil (result based performance) yang menekankan bahwa keberhasilan perangkat daerah tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan, melainkan dari sejauh mana

program dan kegiatan tersebut menghasilkan dampak nyata (outcome) terhadap pertumbuhan investasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu:

1. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi;
2. Nilai LHE AKIP;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Ketiga indikator tersebut merepresentasikan tiga dimensi kinerja organisasi, yaitu dimensi ekonomi, tata kelola, dan pelayanan publik.

3.2.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi pada masing-masing sasaran strategis.

Indikator pertumbuhan realisasi investasi mencatat capaian sebesar 33,24% dari target 5% atau setara dengan 664,8% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan jauh melampaui ekspektasi perencanaan.

Selanjutnya, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 87,48 poin dari target 83 poin atau mencapai 105,4%. Nilai tersebut menempatkan mutu pelayanan pada kategori “Baik” serta mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi bahkan melebihi harapan masyarakat pengguna layanan.

Sementara itu, indikator Nilai LHE AKIP memperoleh skor 72,56 dari target 80,01 atau setara dengan 90,7% dari target. Meskipun menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan masih berada pada predikat “BB”, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan fakta kuantitatif tersebut, terlihat bahwa sebagian besar indikator yang berorientasi pada hasil eksternal, khususnya investasi dan kepuasan masyarakat, telah menunjukkan kinerja sangat baik. Sebaliknya, indikator yang merepresentasikan tata kelola internal organisasi masih memerlukan penguatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa outcome pelayanan dan investasi telah tercapai secara optimal, namun kualitas implementasi manajemen kinerja internal perlu terus ditingkatkan agar keseimbangan antara kinerja eksternal dan tata kelola organisasi dapat terwujud secara berkelanjutan.

A. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Indikator Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mendorong peningkatan nilai investasi yang terealisasi di daerah dari tahun ke tahun. Indikator ini bersifat outcome karena secara langsung merefleksikan dampak ekonomi dari intervensi kebijakan dan pelayanan penanaman modal, antara lain melalui kemudahan perizinan, promosi peluang investasi, fasilitasi pelaku usaha, serta pengawasan realisasi investasi.

Target pertumbuhan investasi Tahun 2025 ditetapkan sebesar 5%, dengan mempertimbangkan tren historis serta proyeksi kondisi

ekonomi daerah. Namun berdasarkan hasil pengumpulan dan rekapitulasi data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi pertumbuhan investasi tercatat sebesar 33,24%.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai:

$$\text{Capaian} = 33,24 \div 5 \times 100\% = 664,8\%$$

Angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja lebih dari enam kali lipat target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara nominal, nilai investasi meningkat dari:

- ❖ Tahun 2024 : Rp 6.888.539.200.000;
- ❖ Tahun 2025 : Rp 9.178.177.286.092

Terdapat kenaikan absolut sebesar ± Rp 2,29 triliun dalam satu tahun anggaran, yang mencerminkan tambahan aktivitas usaha baru maupun perluasan usaha eksisting di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Tren Perkembangan Investasi (Grafik Naratif)

Untuk memberikan gambaran visual mengenai perkembangan investasi selama tiga tahun terakhir, tren dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.1

Perkembangan Investasi Tahun 2023-2025 Kabupaten Deli Serdang



atau secara kuantitatif:

Tahun	Nilai Investasi	Pertumbuhan
2023	Rp 4,41 T	12,86%
2024	Rp 6,89 T	56,07%
2025	Rp 9,18 T	33,24%

Grafik tersebut menunjukkan beberapa hal penting :

1. Terjadi kenaikan konsisten setiap tahun tanpa kontraksi, yang menandakan stabilitas iklim investasi;
2. Lonjakan signifikan pada 2024 diikuti pertumbuhan kuat pada 2025, sehingga kurva membentuk tren akseleratif;
3. Nilai investasi hampir dua kali lipat dibanding 2023, yang mengindikasikan peningkatan daya tarik daerah secara struktural.

Peningkatan tersebut terjadi secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut tanpa mengalami penurunan, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi bersifat berkelanjutan dan didukung oleh perbaikan kondisi iklim usaha daerah.

Berdasarkan data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara untuk triwulan IV tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang menunjukkan posisi yang cukup strategis. Kabupaten Deli Serdang menempati peringkat tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Sumatera Utara dalam hal nilai investasi PMDN maupun PMA.

Total realisasi investasi PMDN di Kabupaten Deli Serdang mencapai Rp 1,639 triliun dengan jumlah proyek 1.962 dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terserap sebanyak 4.109 orang, yang berarti kontribusi sebesar 24,65% terhadap total realisasi PMDN di Sumatera Utara. Untuk investasi PMA, Deli Serdang mencatat realisasi sebesar Rp 577,7 miliar dengan 273 proyek yang menyerap 1.460 tenaga kerja. Jika digabungkan, total investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Deli Serdang mencapai Rp 2,217 triliun dengan 2.235 proyek dan 5.569 tenaga kerja yang terserap, menyumbang sekitar 13,72% dari total investasi di Sumatera Utara.

Posisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu wilayah utama yang menarik minat investasi di tingkat provinsi, berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Namun demikian, perlu dicatat bahwa perbandingan kinerja investasi ini masih terbatas pada level provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Untuk tingkat nasional maupun internasional, data komparatif yang komprehensif

belum tersedia, sehingga benchmarking kinerja investasi DPMPTSP Deli Serdang terhadap standar nasional maupun global belum dapat dilakukan secara optimal.

Sejalan dengan rekomendasi Inspektorat yang mengusulkan penambahan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan capaian pada level nasional atau internasional (benchmarking kinerja), perlu diupayakan penguatan sistem pemantauan dan pelaporan yang dapat mengakomodasi data komparatif tersebut. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan obyektif mengenai posisi dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang, sekaligus sebagai dasar perbaikan dan inovasi kebijakan yang lebih strategis dalam upaya peningkatan daya saing investasi daerah.

Dengan demikian, pengembangan kapasitas benchmarking kinerja secara nasional dan internasional menjadi bagian penting dari strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas DPMPTSP, serta sebagai instrumen evaluasi yang dapat memperkuat daya tarik investasi di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Investaasi PMA/PMDN di Sumatera Utara TW.I
s/d TW IV Tahun 2025 Berdasarkan Lokasi

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA/PMDN DI SUMATERA UTARA TW I S.D TW IV TAHUN 2025 BERDASARKAN LOKASI																	
PMDN						PMA						PMA DAN PMDN					
NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. Juta)	Jlh Proyek LKPM	Jlh TKI	Rasio	NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. Juta)	Jlh Proyek LKPM	Jlh TKI	Rasio	NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. Juta)	Jlh Proyek LKPM	Jlh TKI	Rasio
1	KABUPATEN ASAHAN	1,003,253.13	1,012	821	3.46%	1	KABUPATEN ASAHAN	59,162.07	156	153	0.20%	1	KABUPATEN ASAHAN	1,062,415.20	1,168	974	1.82%
2	KABUPATEN BATUBARA	330,625.19	621	360	1.14%	2	KABUPATEN BATUBARA	557,083.07	175	16	1.88%	2	KABUPATEN BATUBARA	887,708.26	796	376	1.52%
3	KABUPATEN DAIRI	6,686.58	204	7	0.02%	3	KABUPATEN DAIRI	241,784.11	42	78	0.82%	3	KABUPATEN DAIRI	248,470.69	246	85	0.42%
4	KABUPATEN DELI SERDANG	5,161,651.81	7,301	12,734	17.82%	4	KABUPATEN DELI SERDANG	4,016,525.48	1,073	2,689	13.58%	4	KABUPATEN DELI SERDANG	9,178,177.29	8,374	15,423	15.68%
5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	119,229.04	166	71	0.41%	5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	91,677.52	47	4	0.31%	5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	210,906.56	213	75	0.36%
6	KABUPATEN KARO	222,136.03	567	446	0.77%	6	KABUPATEN KARO	244,115.24	100	65	0.83%	6	KABUPATEN KARO	466,251.27	667	511	0.80%
7	KABUPATEN LABUHAN BATU	237,382.41	543	568	0.82%	7	KABUPATEN LABUHAN BATU	113,936.20	83	583	0.39%	7	KABUPATEN LABUHAN BATU	351,318.61	626	1,151	0.60%
8	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	1,083,508.90	385	310	3.74%	8	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	59,010.71	28	77	0.20%	8	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	1,142,519.61	413	387	1.95%
9	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	345,726.68	267	985	1.19%	9	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	35,264.18	60	7	0.12%	9	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	380,990.86	327	992	0.65%
10	KABUPATEN LANGKAT	732,062.10	1,031	1,847	2.53%	10	KABUPATEN LANGKAT	1,555,148.79	51	162	5.26%	10	KABUPATEN LANGKAT	2,287,210.90	1,082	2,009	3.91%
11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	339,676.26	602	874	1.17%	11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	451,852.42	37	6	1.53%	11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	791,528.68	639	880	1.35%
12	KABUPATEN NIAS	11,555.81	67	24	0.04%	12	KABUPATEN NIAS	-	-	-	0.00%	12	KABUPATEN NIAS	11,555.81	67	24	0.02%
13	KABUPATEN NIAS BARAT	7,631.34	30	5	0.03%	13	KABUPATEN NIAS BARAT	394.00	15	-	0.00%	13	KABUPATEN NIAS BARAT	8,025.34	45	5	0.01%
14	KABUPATEN NIAS SELATAN	3,475.52	143	-	0.01%	14	KABUPATEN NIAS SELATAN	22,631.06	56	6	0.08%	14	KABUPATEN NIAS SELATAN	26,106.58	199	6	0.04%
15	KABUPATEN NIAS UTARA	23,240.64	49	23	0.08%	15	KABUPATEN NIAS UTARA	-	1	-	0.00%	15	KABUPATEN NIAS UTARA	23,240.64	50	23	0.04%
16	KABUPATEN PADANG LAWAS	257,920.66	224	616	0.89%	16	KABUPATEN PADANG LAWAS	7,131.57	15	328	0.02%	16	KABUPATEN PADANG LAWAS	265,052.23	239	944	0.45%
17	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	237,577.24	301	786	0.82%	17	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	12,892.21	11	216	0.04%	17	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	250,469.45	312	1,002	0.43%
18	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	81,727.93	134	29	0.28%	18	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	1,246.82	17	-	0.00%	18	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	82,974.75	151	29	0.14%
19	KABUPATEN SAMOSIR	22,143.79	211	27	0.08%	19	KABUPATEN SAMOSIR	1,634.65	14	253	0.01%	19	KABUPATEN SAMOSIR	23,778.44	225	280	0.04%
20	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	575,470.27	823	473	1.99%	20	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	273,575.10	130	278	0.93%	20	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	849,045.37	953	751	1.45%
21	KABUPATEN SIMALUNGUN	7,294,127.08	1,036	1,020	25.19%	21	KABUPATEN SIMALUNGUN	10,808,214.10	206	3,506	36.55%	21	KABUPATEN SIMALUNGUN	18,102,341.18	1,242	4,526	30.93%
22	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1,667,638.50	252	818	5.76%	22	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	3,434,775.20	51	90	11.61%	22	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	5,102,413.71	303	908	8.72%
23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	289,847.10	587	473	1.00%	23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	52.89	22	-	0.00%	23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	289,899.99	609	473	0.50%
24	KABUPATEN TAPANULI UTARA	365,327.03	235	177	1.26%	24	KABUPATEN TAPANULI UTARA	243,421.81	56	33	0.82%	24	KABUPATEN TAPANULI UTARA	608,748.84	291	210	1.04%
25	KABUPATEN TOBA	82,283.15	246	72	0.28%	25	KABUPATEN TOBA	276,226.38	27	14	0.93%	25	KABUPATEN TOBA	358,509.53	273	86	0.61%
26	KOTA BINJAI	84,270.02	2,245	570	0.29%	26	KOTA BINJAI	430,812.92	98	246	1.457%	26	KOTA BINJAI	515,082.94	2,343	816	0.88%
27	KOTA GUNUNGSITOLI	70,531.12	291	146	0.24%	27	KOTA GUNUNGSITOLI	-	3	-	0.00%	27	KOTA GUNUNGSITOLI	70,531.12	294	146	0.12%
28	KOTA MEDAN	8,002,442.70	18,746	23,168	27.63%	28	KOTA MEDAN	6,596,772.30	1,750	1,717	22.31%	28	KOTA MEDAN	14,599,215.01	20,496	24,885	24.94%
29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	15,462.95	286	151	0.05%	29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	-	3	-	0.00%	29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	15,462.95	289	151	0.03%
30	KOTA PEMATANG SIANTAR	179,971.24	942	1,071	0.62%	30	KOTA PEMATANG SIANTAR	33,244.85	44	171	0.11%	30	KOTA PEMATANG SIANTAR	213,216.09	986	1,242	0.36%
31	KOTA SIBOLGA	12,921.88	230	97	0.04%	31	KOTA SIBOLGA	3,368.55	3	-	0.01%	31	KOTA SIBOLGA	16,290.43	233	97	0.028%
32	KOTA TANJUNG BALAI	14,511.68	114	119	0.0501%	32	KOTA TANJUNG BALAI	-	-	-	0.00%	32	KOTA TANJUNG BALAI	14,511.68	114	119	0.025%
33	KOTA TEBING TINGGI	77,668.01	440	531	0.2682%	33	KOTA TEBING TINGGI	2,323.55	12	16	0.01%	33	KOTA TEBING TINGGI	79,991.56	452	547	0.1367%
TOTAL		28,959,683.79	40,331	49,419	100.00%	TOTAL		29,574,277.77	4,386	10,714	100.00%	TOTAL		58,533,961.56	44,717	60,133	100.00%

Sumber : DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

B. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP)

Indikator Nilai LHE AKIP digunakan untuk menilai tingkat kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah. Indikator ini merepresentasikan dimensi tata kelola internal organisasi yang mencakup keselarasan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan pengalokasian anggaran.

Berbeda dengan indikator investasi dan kepuasan masyarakat yang berorientasi pada outcome eksternal, nilai LHE AKIP

menggambarkan kematangan sistem manajemen kinerja secara internal. Oleh karena itu, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana proses bisnis organisasi telah berjalan secara efektif, terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Pengukuran indikator dilakukan melalui evaluasi independen oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP, dengan rentang skor 0–100 serta klasifikasi predikat kinerja.

Pada Tahun 2025, target nilai LHE AKIP ditetapkan sebesar 80,01, sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar 72,56 dengan predikat BB (Sangat Baik).

Tingkat capaian dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = 72,56 \div 80,01 \times 100\% = 90,7\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai dan masih terdapat selisih sebesar 7,45 poin dari standar kinerja yang direncanakan.

Tren Perkembangan Nilai LHE AKIP

Perkembangan nilai LHE AKIP selama tiga tahun terakhir menunjukkan pola sebagai berikut:

Tahun	Nilai	Kenaikan Tahunan
2023	70,81	–
2024	70,82	+0,01
2025	72,56	+1,74

Data tersebut memperlihatkan adanya tren peningkatan secara konsisten, namun kenaikan masih bersifat bertahap dan belum menunjukkan percepatan yang signifikan. Dalam kurun waktu tiga tahun, peningkatan nilai relatif terbatas, sehingga perbaikan sistem manajemen kinerja masih berlangsung secara gradual.

Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pembenahan tata kelola telah dilakukan, namun dampaknya terhadap peningkatan skor evaluasi belum optimal.

C. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi dan penilaian masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Indikator ini bersifat outcome karena mencerminkan hasil akhir dari proses pelayanan, yaitu sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat.

Berbeda dengan indikator investasi yang mengukur dampak ekonomi dan indikator AKIP yang mengukur tata kelola internal, IKM merepresentasikan dimensi kualitas pelayanan publik secara langsung dari sudut pandang pengguna layanan. Oleh karena itu, nilai IKM menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pengukuran IKM dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner terstandar sesuai pedoman survei pelayanan publik. Survei dilakukan secara daring (online) dengan melibatkan 2.749 responden, yang merupakan pengguna layanan perizinan dan nonperizinan sepanjang Tahun 2025.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kategori Pendidikan	Jumlah Responden Triwulan I, II, III, IV	
		(orang)	(%)
1	Laki - laki	591	21.50
2	Perempuan	2158	78.50
	Jumlah	2749	100

Sumber : *Laporan IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang*

Responden Perempuan dominan sebagai pengguna jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Pada Triwulan I s/d IV yaitu Perempuan sebesar 78,5 % sedangkan responden Laki-laki hanya sebanyak 21,5 %. Responden memberikan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan.

Target nilai IKM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 83 poin, sedangkan hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 87,48 poin.

Tingkat capaian dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = 87,48 \div 83 \times 100\% = 105,4\%$$

Nilai tersebut berada pada kategori mutu pelayanan “Baik” dan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan telah melampaui target yang direncanakan.

Tren Perkembangan IKM

Perkembangan nilai IKM selama tiga tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun	Nilai IKM	Perubahan
2023	87,12	–
2024	87,04	-0,08
2025	87,48	+0,44

Data tersebut menunjukkan bahwa nilai IKM berada pada kisaran tinggi (≥ 87) selama tiga tahun berturut-turut. Fluktuasi nilai relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berada pada kondisi stabil dan terjaga secara konsisten.

Kondisi ini menandakan bahwa tidak terjadi penurunan mutu pelayanan yang signifikan, sekaligus menunjukkan bahwa standar pelayanan publik telah diterapkan secara berkelanjutan.

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	33,24%	664,8%	Laporan Realisasi Investasi Daerah dari BKPM RI
2.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80,01	72,56	90,7%	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPSTSP Kab. Deli Serdang.
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,48	105,4%	Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Sumber : *Laporan PK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.*

3.2.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Analisis perbandingan kinerja antar tahun dilakukan untuk menilai konsistensi capaian, mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Pendekatan time series ini penting dalam kerangka akuntabilitas kinerja karena memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan capaian satu tahun, tetapi juga melihat keberlanjutan hasil pembangunan.

Perbandingan dilakukan terhadap tiga indikator utama kinerja perangkat daerah, yaitu:

1. Pertumbuhan Realisasi Investasi;
 2. Nilai LHE AKIP, dan
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
- dengan periode pengamatan Tahun 2023–2025.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Target Renstra 2025-2026	Realisasi Capaian Tahun ke-			Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Realisasi Investasi			90	90		102,17	159,46		
2.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi					5			33,24	
3.	LHE - AKIP			79	82	80,01	78,42	70,82	72,56	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	82	83	87,12	87,04	87,48	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Tren Realisasi Investasi

Perkembangan realisasi nilai investasi selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Nilai Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2023	4.413.615.800.000	12,86
2024	6.888.539.200.000	56,07
2025	9.178.177.286.092	33,24

Secara nominal, nilai investasi meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun, dari Rp 4,41 triliun pada Tahun 2023 menjadi Rp 9,18 triliun pada Tahun 2025. Kenaikan kumulatif mencapai sekitar Rp 4,76 triliun.

Pertumbuhan yang terjadi tidak bersifat fluktuatif atau menurun, melainkan menunjukkan arah peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa iklim investasi daerah semakin kondusif, didukung oleh perbaikan layanan perizinan, pendampingan pelaku usaha, serta strategi promosi penanaman modal yang lebih aktif.

Dari sudut pandang evaluasi kinerja, indikator investasi memperlihatkan performa yang sangat baik karena menunjukkan outcome ekonomi yang meningkat secara nyata dan berkelanjutan.

B. Tren Nilai LHE AKIP

Perkembangan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan adanya perbaikan bertahap, meskipun dengan laju peningkatan yang relatif moderat.

Tahun	Nilai AKIP
2023	70,81
2024	70,82
2025	72,56

Nilai AKIP meningkat sebesar 1,75 poin dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa praktik manajemen kinerja telah mengalami perbaikan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan pengendalian kinerja.

Namun demikian, kenaikan yang terjadi masih relatif gradual dan belum menunjukkan akselerasi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan sistem akuntabilitas masih memerlukan pembenahan lebih lanjut, terutama pada integrasi antara perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta cascading indikator sampai level individu.

Secara evaluatif, indikator AKIP menunjukkan tren positif, tetapi efektivitasnya belum optimal dibandingkan indikator lainnya.

C. Tren Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Perkembangan nilai IKM selama periode pengamatan menunjukkan stabilitas pada level tinggi.

Tahun	Nilai IKM
2023	87,12
2024	87,04
2025	87,48

Nilai IKM berada pada kisaran 87 setiap tahun dengan variasi yang sangat kecil. Stabilitas ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan publik telah terjaga secara konsisten dan tidak mengalami penurunan kualitas.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa standar pelayanan, kompetensi petugas, serta pemanfaatan layanan digital telah mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat pada kategori baik.

Dari sisi evaluasi, indikator IKM menunjukkan kinerja yang stabil dan andal, karena kualitas layanan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Analisis Perbandingan Kinerja Antar Indikator

Berdasarkan perbandingan tiga tahun terakhir, dapat diidentifikasi karakteristik capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- ✧ Investasi → menunjukkan tren peningkatan kuat dan akseleratif (growth oriented);

- ✧ AKIP → menunjukkan peningkatan bertahap namun masih memerlukan penguatan (improvement in progress);
- ✧ IKM → menunjukkan stabilitas tinggi pada kategori baik (service consistency)

Perbandingan ini menggambarkan bahwa kinerja eksternal organisasi (investasi dan pelayanan publik) berkembang lebih cepat dibandingkan penguatan tata kelola internal (AKIP). Artinya, outcome kepada masyarakat dan dunia usaha telah tercapai secara nyata, sedangkan sistem manajemen kinerja masih memerlukan optimalisasi agar selaras dengan capaian eksternal tersebut.

Berikut adalah capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2025 :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(8)		
1	Meningkatkan Investasi		Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	(Rp.Juta)	4.375.389,83	9.178.177,28	209,76
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	5,00 %	33,24	664,8
2	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai LHE AKIP	Nilai	80,01	72,56	90,7
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	Nilai	80,01	72,56	90,7
3	Meningkatkan pelayanan prima pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	87,48	105,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83	87,48	105,4

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

3.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2025–2026 disajikan dalam Tabel 3.9. Analisis perbandingan ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian indikator strategis utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan organisasi, serta untuk menilai konsistensi pencapaian kinerja terhadap rencana strategis yang telah ditetapkan.

1. Pertumbuhan Investasi

Indikator persentase pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 33,24%, jauh melebihi target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 6%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 552,67%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan Dinas dalam meningkatkan iklim investasi, memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, serta mempercepat realisasi proyek investasi di wilayah kerja. Tingginya tingkat pertumbuhan investasi ini menjadi indikator positif keberhasilan implementasi strategi yang terkait dengan peningkatan daya saing daerah, promosi investasi, dan fasilitasi perizinan.

2. Kualitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai LHE AKIP yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 72,56, dibandingkan target akhir rencana strategis sebesar 80,2, sehingga tingkat kemajuan mencapai 90,67%. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perangkat daerah,

meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program pembinaan internal, penguatan manajemen kinerja, optimalisasi prosedur kerja, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur mulai membuahkan hasil, namun masih perlu penguatan lebih lanjut agar target jangka menengah dapat tercapai secara penuh.

3. Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 tercatat sebesar 87,48, melebihi target jangka menengah sebesar 85, sehingga tingkat kemajuan mencapai 102,91%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan program peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas. Keberhasilan ini dihasilkan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan responsivitas terhadap keluhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar-unit kerja untuk memastikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Hasil capaian di atas target ini menjadi indikator keberhasilan strategi pelayanan yang telah diterapkan.

Tabel 3.7 berikut menyajikan rincian capaian indikator strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun 2025:

Tabel 3.7
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	33,24	6	554
2	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	72,56	80,2	90,67
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,48	85	102,91

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

3.2.4 Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	33,24%	664,8%	Keberhasilan luar biasa tercapai karena berbagai upaya sosialisasi, bimbingan teknis, promosi, dan pengawasan yang sistematis terhadap pelaku usaha. Tingginya realisasi menunjukkan efektivitas strategi komunikasi, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi	1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha yang belum paham dalam mengisi laporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan; 2. Meningkatkan pengawasan perizinan berusaha terhadap pelaku usaha agar mematuhi peraturan yang

						informasi dalam mendorong investasi.	sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah; 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan terhadap Petugas PATEN. 4. Memanfaatkan media sosial/online dengan cara membuat promosi di Instagram, Website, Youtube yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang; 5. Pembuatan video peluang investasi; 6. Adanya Sistem Informan (Informasi Penanaman Modal) Kabupaten Deli Serdang pada Sistem Seri Deli yang dikembangkan oleh DPMPSTSP untuk memberikan Informasi tentang Penanaman Modal di kabupaten Deli Serdang; 7. Sarana dan prasarana yang memadai; 8. Adanya Tim Kerja Optimalisasi Realisasi Investasi DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang; 9. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha.
2	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80,01	72,56	90,7%	Capaian berada di bawah target, menunjukkan masih terdapat kendala pada penerapan akuntabilitas kinerja dan tata kelola internal. Faktor penyebab antara lain kapasitas SDM, implementasi sistem pengawasan, dan koordinasi antar-unit yang belum optimal.	1. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM perangkat daerah. 2. Optimalisasi prosedur kerja internal. 3. Peningkatan pengawasan internal dan monitoring kinerja. 4. Penguatan koordinasi antar-unit kerja untuk memastikan penerapan akuntabilitas kinerja.

3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,48	105,4%	Keberhasilan tercapai karena pelayanan lebih responsif dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi online dan evaluasi berkala kepuasan masyarakat. Hasil di atas target menunjukkan efektivitas strategi pelayanan berbasis online dan pendekatan masyarakat.	1. Meningkatkan pelayanan perizinan berbasis online melalui klinik OSS. 2. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. 3. Optimalisasi sistem pelayanan untuk mempercepat proses perizinan dan non-perizinan. 4. Penguatan mekanisme feedback masyarakat untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan.
---	--	----------------------------	----	-------	--------	---	--

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Metodologi Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi

Pengukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perhitungan tersebut digunakan

untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Kinerja} \div \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

Sementara itu, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan dalam menghasilkan capaian kinerja. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

Efisiensi

$$= (\text{Pagu Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}) \div \text{Pagu Anggaran} \times 100\%$$

atau

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \text{Persentase Realisasi Anggaran}$$

Melalui pendekatan tersebut, analisis efektivitas dan efisiensi dapat memberikan gambaran yang terukur mengenai hubungan antara capaian kinerja dan penggunaan sumber daya, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

A. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Indikator yang digunakan adalah Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi.

Tabel 3.9

Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	5	33,24	664,8	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	219.372.400,-	108.528.000,-	49,47
							2	Program Promosi Penanaman Modal	77.898.700,-	45.223.800,-	58,05
							3	Program Pelayanan Penanaman Modal	943.261.500,-	912.796.498,-	96,77
							4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	110.954.800,-	73.720.800,-	66,44
							5	Program Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota	233.676.200,-	233.326.200,-	99,85
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			664,8	TOTAL PER SASARAN		1.585.163.600,-	1.373.595.298,-	86,65	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 13,35%											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 664,8%											

Capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar 86,65% menghasilkan efisiensi sebesar 13,35%, yang menunjukkan adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi pencapaian sasaran. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada sasaran ini dapat dikategorikan efektif dan efisien.

Meskipun capaian kinerja pertumbuhan realisasi investasi pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan, tetap diperlukan langkah-langkah penguatan guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan investasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang.

Beberapa upaya perbaikan yang direkomendasikan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, melalui penyusunan materi promosi yang lebih komprehensif, partisipasi dalam forum investasi berskala regional dan nasional, serta optimalisasi media digital sebagai sarana publikasi peluang investasi daerah;
2. Peningkatan kualitas dan integrasi data peluang investasi, melalui pemutakhiran peta potensi investasi dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi, sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh calon investor;
3. Optimalisasi pengawasan dan kepatuhan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), melalui peningkatan sosialisasi

dan pendampingan kepada pelaku usaha guna memastikan ketepatan dan konsistensi pelaporan realisasi investasi;

4. Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan pemangku kepentingan terkait, dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan serta penyelesaian hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha;

5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan investasi, meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, serta memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan adalah Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.10

**Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	1.1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	poin	80,01	72,56	90,7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.184.079.605,-	7.782.020.930,-	84,73
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR							TOTAL SASARAN	9.184.079.605,-	7.782.020.930,-	84,73
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 15,27 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 90,7 %												

Capaian Nilai LHE AKIP belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dengan capaian anggaran sebesar 84,73%, diperoleh efisiensi sebesar 15,27%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif efisien, namun peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja masih perlu diperkuat agar target dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah Upaya perbaikan yang direkomendasikan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat daerah, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan kompetensi, sehingga pemahaman terhadap prosedur manajemen kinerja, perencanaan strategis, dan akuntabilitas dapat lebih optimal;
2. Optimalisasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi internal, agar penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan lebih akuntabel dan sesuai standar LHE AKIP;
3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, termasuk penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, serta laporan capaian kinerja, agar penyajian data dan informasi kinerja lebih lengkap, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pelaporan dan pemantauan capaian kinerja dapat dilakukan secara real-time, meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan program/kegiatan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi antarunit perangkat daerah, untuk memperkuat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, sehingga hasil kinerja dapat lebih selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai LHE AKIP secara berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih profesional dan transparan.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.11
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	83	87,48	105,4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.111.472.668,-	1.904.598.053,-	90,20
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					105,4	TOTAL SASARAN		2.111.472.668,-	1.904.598.053,-	90,20
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 9,80 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 105,4 %												

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan capaian anggaran sebesar 90,20%, diperoleh efisiensi sebesar 9,80%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat dicapai dengan pengelolaan anggaran yang relatif efisien.

Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan menunjukkan tingkat kepuasan yang baik, namun terdapat ruang untuk perbaikan guna mencapai pelayanan prima yang lebih optimal. Beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penyederhanaan dan percepatan prosedur pelayanan perizinan, melalui revisi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien, mudah dipahami, dan cepat diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, termasuk penyediaan ruang layanan yang nyaman, fasilitas digital dan dokumentasi yang lengkap, agar masyarakat dan investor memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih optimal;
3. Penguatan kapasitas petugas pelayanan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan kompetensi, sehingga mampu memberikan informasi, konsultasi, dan pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan berbasis elektronik, seperti pengembangan sistem perizinan daring (online) dan integrasi data perizinan, agar masyarakat dan

pelaku usaha dapat memperoleh layanan secara transparan, efektif, dan efisien;

5. Koordinasi intensif dengan instansi terkait, untuk mempercepat proses penerbitan izin, menyelesaikan hambatan, dan meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga kepuasan masyarakat dan investor dapat meningkat secara berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat secara konsisten, mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, dan memperkuat citra profesionalisme Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target 2025			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	33,24%	664,8	1.585.163.600,-	1.373.595.298,-	86,65	13,35
2	Nilai LHE AKIP	80,01	72,56	90,7	9.184.079.605,-	7.782.020.930,-	84,73	15,27
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,48	105,4	2.111.472.668,-	1.904.598.053,-	90,20	9,80

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program dan kegiatan bertujuan menilai kontribusi setiap program terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dicatat sebagai menunjang, sedangkan kegiatan yang tidak optimal dicatat sebagai tidak menunjang.

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 memberikan dukungan positif terhadap pencapaian sasaran strategis, baik terkait peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah, pelayanan publik, maupun pertumbuhan investasi. Berikut Hasil analisis disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah - Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80,01	72,56	90,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100	Menunjang

						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100	Menunjang
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	Menunjang
	Meningkatkan pelayanan prima pemerintah daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87,48	105,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	Menunjang
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	100	Menunjang
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100	Menunjang
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100	Menunjang
2	Meningkatkan investasi - Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5%	33,24%	664,8%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	100	Menunjang
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	100	Menunjang
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	66,67	Menunjang
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	66,67	Menunjang
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100	Menunjang

						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal	100	Menunjang
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	85,33	Menunjang
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	85,33	Menunjang
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	100	Menunjang
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi

Indikator: Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi

Pada tahun 2025 ditetapkan target pertumbuhan realisasi investasi sebesar 5%, dengan realisasi sebesar 33,24%, sehingga capaian kinerja mencapai 664,8%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi meningkat secara signifikan melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program strategis yang saling melengkapi sebagai berikut.

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, perangkat daerah berupaya meningkatkan ketersediaan dan keterbukaan informasi potensi investasi melalui penyusunan video profil investasi daerah serta pengembangan aplikasi SiInforman (Sistem Informasi

Penanaman Modal). Media informasi tersebut mempermudah calon investor dalam memperoleh gambaran peluang usaha, sektor unggulan, serta prosedur penanaman modal secara cepat dan mandiri. Penyediaan informasi yang komprehensif ini berdampak pada meningkatnya minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di daerah.

Pada Program Promosi Penanaman Modal, kegiatan promosi dilaksanakan secara daring dan luring melalui publikasi digital, penyebarluasan informasi, serta pertemuan promosi investasi. Strategi promosi yang lebih aktif dan menjangkau berbagai segmen investor memperluas eksposur potensi daerah serta membuka peluang kerja sama investasi baru. Intensifikasi promosi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah komitmen dan realisasi investasi.

Selanjutnya, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diarahkan untuk memastikan keberlanjutan investasi yang telah terealisasi melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Upaya yang dilakukan antara lain bimbingan teknis kepada 50 pelaku usaha, sosialisasi perizinan berusaha (OSS) dan perizinan/non-perizinan (SERI DELI) pada 22 kecamatan dengan 982 peserta, serta pengawasan terhadap 36 kegiatan usaha atau melampaui target 25 kegiatan usaha. Pembinaan dan pengawasan tersebut meningkatkan kepatuhan pelaporan dan mengurangi potensi hambatan usaha, sehingga menjaga stabilitas realisasi investasi.

Sinergi ketiga program tersebut menghasilkan peningkatan minat, realisasi, serta keberlanjutan investasi daerah, yang secara langsung mendorong pertumbuhan realisasi investasi jauh di atas target yang ditetapkan.

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ditetapkan sebesar 83, dengan realisasi 87,48, sehingga capaian kinerja mencapai 105,4%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah melampaui ekspektasi masyarakat. Peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal yang berorientasi pada perbaikan sistem dan proses layanan.

Pelayanan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik yang terintegrasi, sehingga prosedur menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien. Kemudahan tersebut tercermin dari tingginya pemanfaatan layanan, dengan realisasi pelayanan kepada 5.523 pelaku usaha dari target 5.000 pelaku usaha.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyederhanaan SOP, percepatan waktu layanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang nyaman dan inklusif. Berbagai perbaikan tersebut meningkatkan kepastian layanan, meminimalkan kendala administrasi, dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Secara outcome, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan, yang tercermin dari nilai IKM yang melampaui target kinerja.

Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Akuntabel

Indikator: Nilai LHE AKIP

Nilai LHE AKIP ditargetkan sebesar 80,01, dengan realisasi 72,56 atau capaian 90,7%. Meskipun belum mencapai target, hasil ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik dan masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan meliputi penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, penyempurnaan cascading indikator kinerja, peningkatan kualitas penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala. Langkah-langkah tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP dan diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai AKIP pada tahun berikutnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dukungan tersebut dilaksanakan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, melalui integrasi perspektif gender pada proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan perangkat daerah.

Implementasi PUG dilaksanakan melalui pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dituangkan dalam dokumen

Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), khususnya pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai program yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal, perspektif gender diwujudkan melalui penyediaan pelayanan perizinan yang setara, non-diskriminatif, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan. Upaya tersebut antara lain melalui penyediaan ruang laktasi/ruang menyusui bagi ibu menyusui, fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, jalur prioritas pelayanan, serta sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah gender dan inklusif.

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, integrasi gender dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan penyediaan informasi kepada pelaku usaha tanpa membedakan jenis kelamin, termasuk mendorong peningkatan partisipasi pelaku usaha perempuan dalam kegiatan investasi. Selain itu, dilakukan pengumpulan dan pengolahan data terpisah menurut jenis kelamin sebagai dasar analisis kebutuhan, penyusunan kebijakan, serta evaluasi efektivitas pelaksanaan program.

Pelaksanaan program responsif gender tersebut menghasilkan keluaran berupa tersedianya fasilitas pelayanan yang inklusif, meningkatnya kemudahan akses layanan, serta tersedianya data pendukung perumusan kebijakan. Secara hasil (outcome), implementasi PUG berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi dan akses pelaku usaha perempuan, meningkatnya kualitas dan keadilan pelayanan publik, serta meningkatnya kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, pelayanan penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang semakin profesional, inklusif, dan akuntabel.

3.2.7 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Inspektorat Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Tahun 2024. Tindak lanjut ini memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi, meningkatkan efektivitas layanan publik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Berikut tabel tindak lanjut rekomendasi evaluasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 :

Tabel 3.14
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Inspektorat Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	Menjalankan dengan baik SOP (Standar Operasional Prosedur) mekanisme pengumpulan data kinerja dan menampilkan bukti dukung	Telah dilakukan pengumpulan data kinerja sesuai SOP dan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja secara berkala (triwulan)	- SOP Pengumpulan Data Kinerja - Notulen rapat - Daftar Hadir Rapat - Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan https://drive.google.com/drive/folders/1OM-6z8i68tKfD8qq0TvtGRc9d_imaCZL?usp=drive_link
2.	Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional atau provinsi (Benchmark Kinerja)	Telah dilakukan pengumpulan dan penyajian data pembanding realisasi kinerja dengan capaian kinerja tingkat provinsi sebagai bahan analisis kinerja	- Data Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Utara - Dokumen LKjIP/LKPJ yang memuat perbandingan kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1EvZEo2lSn6G50vPWWhNYJW8uvIsZS1Qbg?usp=drive_link
3.	Merubah data baseline pada Renstra terbaru (2025-2029) serta mengusulkan perubahan terhadap data baseline pada Ranwal RPJMD untuk indikator persentase peningkatan investasi dengan dasar rumus perhitungan yang benar.	Telah dilakukan penyesuaian data baseline dan rumus perhitungan indikator persentase peningkatan investasi pada Renstra DPMPSTSP Tahun 2025–2029 serta penyampaian usulan penyesuaian kepada perangkat daerah terkait dalam penyusunan Ranwal RPJMD	- Renstra DPMPSTSP 2025–2029 - Berita Acara Revisi - Dokumen Ranwal RPJMD (draft) https://drive.google.com/drive/folders/1IHurdBwEhZEfeHWRfXjn014-twS61r8?usp=drive_link

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

Hingga akhir tahun 2025, sebagian besar rekomendasi telah dilaksanakan atau dalam proses implementasi, yang terlihat dari:

- ❖ Peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah (Nilai LHE AKIP: 90,7%).
- ❖ Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Indeks Kepuasan Masyarakat: 105,4%).
- ❖ Realisasi pertumbuhan investasi yang melampaui target (Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi: 664,8%).

Pelaksanaan tindak lanjut ini menjadi bagian integral dari strategi perbaikan kinerja dan penguatan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko penyimpangan, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, dan memastikan pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran memuat penjelasan terkait penggunaan anggaran serta tingkat efisiensi sumber daya dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Uraian capaian anggaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAI AN
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah;	11.295.552.273	9.686.618.983	85,76
		2. Manajemen Risiko Indeks			
		3. IKM Perangkat Daerah			
1.1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	130.922.780	110.770.780	84,61
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.574.300	49.271.300	95,53
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.581.340	13.286.340	91,12
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.581.340	13.286.340	91,12
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14.226.500	982.500	6,91
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	14.146.600	12.851.600	90,85
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	21.812.700	21.092.700	96,70
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	9.053.156.825	7.671.250.150	84,74
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.691.251.425	7.332.830.129	84,37
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	347.700.000	324.550.621	93,34

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAI AN
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.205.400	13.869.400	97,63
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	47.300.000	46.400.000	98,10
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.300.000	46.400.000	98,10
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	514.009.596	491.683.868	95,66
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.050.800	4.050.800	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	253.786.751	248.369.784	97,87
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.160.768	60.160.768	100,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	53.737.393	51.837.393	96,46
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5.433.494	5.010.000	92,21
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.497.390	22.642.000	96,36
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.343.000	99.613.123	87,89
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.044.000	15.044.000	100,00
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15.044.000	15.044.000	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAI AN
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	1.213.641.672	1.089.742.490	89,79
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000	360.000	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	608.115.168	485.665.288	79,86
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	21.870.000	21.870.000	100,00
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	583.296.504	581.847.202	99,75
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	321.477.400	261.727.695	81,41
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	250.588.400	191.297.695	76,34
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	48.319.000	47.860.000	99,05
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22.570.000	22.570.000	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	219.372.400	108.528.000	49,47
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	219.372.400	108.528.000	49,47
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	112.204.400	3.300.000	2,94
2.1.2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	107.168.000	105.228.000	98,19

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAI AN
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	77.898.700	45.223.800	58,05
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	77.898.700	45.223.800	58,05
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	47.994.900	15.320.000	31,92
3.1.2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	29.903.800	29.903.800	100,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	943.261.500	912.796.498	96,77
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dibidang Penanaman Modal	943.261.500	912.796.498	96,77
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	906.430.800	879.570.798	97,04
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	36.830.700	33.225.700	90,21
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	110.954.800	73.720.800	66,44
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	110.954.800	73.720.800	66,44

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAI AN
			Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	13.038.000	7.478.000	57,36
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	91.570.800	59.896.800	65,41
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	6.346.000	6.346.000	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	233.676.200	233.326.200	99,85
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	233.676.200	233.326.200	99,85
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	233.676.200	233.326.200	99,85
TOTAL			12.880.715.873	11.060.214.281	85,87

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

Uraian penjelasan tabel:

Pagu anggaran yang dialokasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 melalui APBD setelah perubahan sebesar Rp 12.880.715.873,-, dengan realisasi Rp 11.060.214.281,-, sehingga capaian penggunaan anggaran mencapai 85,87%.

Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien, dengan sebagian besar program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai target, meskipun terdapat beberapa subkegiatan yang belum mencapai 100% realisasi, terutama pada penyusunan dokumen DPA-SKPD. Efisiensi ini mencerminkan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

LKjIP Tahun 2025 menggambarkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Analisis kinerja yang disajikan mencerminkan tingkat keberhasilan maupun aspek yang masih memerlukan penguatan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik. Pertumbuhan realisasi investasi melampaui target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan efektivitas kebijakan pengembangan iklim penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu. Indeks Kepuasan Masyarakat juga berada di atas target, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai LHE AKIP menunjukkan capaian yang baik dan mendekati target, yang mengindikasikan adanya penguatan dalam sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Di samping keberhasilan tersebut, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, antara lain peningkatan konsistensi pelaporan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha, optimalisasi integrasi sistem informasi, serta penguatan kualitas promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis potensi unggulan daerah. Evaluasi atas aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja organisasi.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2025 ini, diharapkan tersaji informasi yang objektif dan terukur mengenai tingkat pencapaian kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG, sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada pemangku kepentingan serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkesinambungan.

Lubuk Pakam, Februari 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG



A. PIRIYAN SYUKRI
PIMBINA Tk. I
NIP. 19840715 200312 1 010

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. HENDRA WIJAYA
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN Modal DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG.
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : WIRIYA ALRAHMAN
Jabatan : Pj. BUPATI DELI SERDANG
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, Januari 2025

Pihak Kedua,



WIRIYA ALRAHMAN

Pihak Pertama,



Drs. HENDRA WIJAYA
NIP. 19691213 199010 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	5 %
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE-AKIP Perangkat Daerah	80,01 Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program pengembangan iklim penanaman modal	Rp. 267.544.300,-	APBD
2	Program promosi penanaman modal	Rp. 171.866.700,-	APBD
3	Program pelayanan penanaman modal	Rp. 977.983.623,-	APBD
4	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Rp. 139.225.000,-	DANA ALOKASI UMUM
5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	Rp. 250.042.400,-	APBD
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 11.126.746.556,-	APBD

PJ. Bupati Deli Serdang

WIRIYA ALRAHMAN

Lubuk Pakam, Januari 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang**

Drs. HENDRA WIJAYA
NIP. 19691213 199010 1 002

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon. (061) - 80024154 Faks. (061) - 7955895
Pos-el : perizinan@deliserdangkab.go.id Laman : perizinan.deliserdangkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR : 000.8.6.3/0088/SK/DPMPTSP-DS/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dimanfaatkan sebagai :

- A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- B. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- C. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- D. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- E. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. HENDRA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196912131990101002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
 Nomor : 000.0.6.3/0088/SK/DPMP-TSP-05/2024
 Tanggal : 2 Januari 2025

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persen (%)	Indikator kinerja sasaran strategis ini untuk mengetahui capaian pertumbuhan realisasi investasi.	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun n (Tahun Berjalan) dikurangi nilai investasi PMDN dan PMA Tahun n-1 (Tahun Lalu) dibagi nilai investasi PMDN dan PMA Tahun n-1 (Tahun Lalu) dikali 100 persen.	Laporan Realisasi Investasi dari Kementrian Investasi / BKPM dan DPMP-TSP Provinsi Sumatera Utara	
2.	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara publik melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 80% penerima layanan, dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 indikator penilaian, dengan mengacu kepada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu : 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 4) Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana,	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMP-TSP Kab. Deli Serdang	

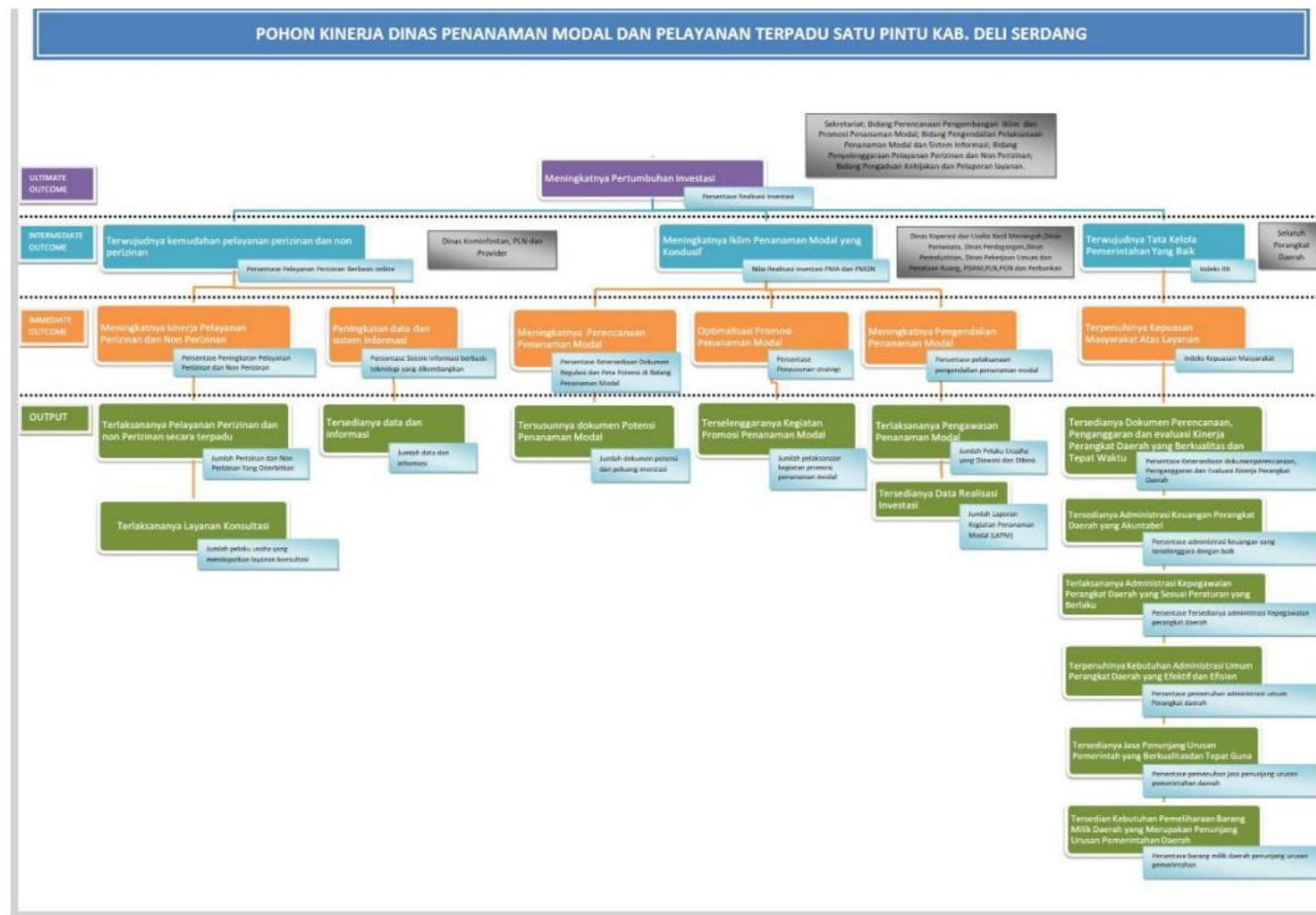
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					7)Perilaku Pelaksana, 8)Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan, 9) Sarana dan Prasarana.		
3.	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	LHE-AKIP	Poin	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67A Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan dalam pengelolaan AKIP Kabupaten Deli serdang,dalam lingkup perencanaan kinerja pengukuran kinerja,capaian kinerja,evaluasi kinerja dan pelaporan.	Akumulasi Penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP dengan Rincian : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 5. Capaian Kinerja.	Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG



Drs. HENDRA WIJAYA
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP 196912131990101002

Lampiran 3. Pohon Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

99

Strategis & Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Indikator Kinerja Utama Layanan Umum Pelayanan	30%	30%	10%	30%	3.5/5.000	10.000.000
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
Strategis & Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Indikator Kinerja Utama Layanan Umum Pelayanan	30%	30%	10%	30%	3.5/5.000	10.000.000
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
Strategis & Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian Indikator Kinerja Utama Layanan Umum Pelayanan	30%	30%	10%	30%	3.5/5.000	10.000.000
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					
		Penilaian & Pengukuran Kinerja					

Lampiran 5 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU selama 5 tahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatkan Investasi	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
			2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
			2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											
			2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	1	325.600.000	1	325.600.000	Bidang P2IPPM	Kab. Deli Serdang
			2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		1	157.000.000	1	157.000.000	1	157.000.000	Bidang P2IPPM	Kab. Deli Serdang

			2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
			2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
			2	18	03	2.01	0 0 0 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		4	625.000 .000	4	675.000.0 00	4	675.000. 000	Bidang P2IPPM	Kab. Deli Serdang
			2	18	03	2.01	0 0 0 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen		5	112.000 .000	-	-	-	-	Bidang P2IPPM	Kab. Deli Serdang
			2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
			2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											
			2	18	04	2.01	0 0 0 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		5.000	1.233.0 12.174	5.000	1.350.000. 000	5.000	1.350.00 0.000	Bidang PPNP	Kab. Deli Serdang

			2	18	04	2.01	0 0 0 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		3.200	199.239.800	3.520	241.324.060	3.520	241.324.060	Bidang PKPP	Kab. Deli Serdang
			2	18	04	2.01	0 0 0 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha		140	150.000.000	160	170.000.000	160	170.000.000	Bidang PPPM	Kab. Deli Serdang
			2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
			2	18	05	2.01		<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>											
			2	18	05	2.01	0 0 0 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.		14	78.000.000	16	82.000.000	16	82.000.000	Bidang PPPM	Kab. Deli Serdang

			2	18	05	2.01	0 0 0 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha		350	300.000.000	400	350.000.000	400	350.000.000	Bidang PPPM	Kab. Deli Serdang
			2	18	05	2.01	0 0 0 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha		140	150.000.000	160	170.000.000	160	170.000.000	Bidang PPPM	Kab. Deli Serdang
			2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
			2	18	06	2.01		<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>											

			2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	Bidang PPPM	Kab. Deli Serdang
			X	X X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX											
Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	X	X X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			X	X X	01	2,01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>											
			X	X X	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	60.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang

			X	X X	01	2,01	0 0 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen		1	20.000. 000	1	20.000.00 0	1	20.000.0 00	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,01	0 0 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen		1	20.000. 000	1	20.000.00 0	1	20.000.0 00	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,01	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen		1	20.000. 000	1	20.000.00 0	1	20.000.0 00	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	25.000. 000	1	25.000.00 0	1	25.000.0 00	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>											

			X	X X	01	2,02	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		45	8.386.775.332	47	8.916.707.066	47	8.916.707.066	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,02	0 0 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	418.572.000	12	460.429.200	12	460.429.200	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,02	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	34.080.728	1	37.488.801	1	37.488.801	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
Meningkatkan pelayanan prima pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	X	X X	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			X	X X	01	2,05	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		45	35.100.000	47	39.950.000	47	39.950.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
			X	X X	01	2,06	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		8	7.400.000	8	8.800.000	8	8.800.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang

			X	X X	01	2,06	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		10	250.000.000	8	275.000.000	8	275.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4	20.000.000	4	22.000.000	4	22.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		75	85.000.000	78	102.000.000	78	102.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		9	70.000.000	10	80.500.000	10	80.500.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06	0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		2	7.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06	0 0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	31.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,06	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		200	310.000.000	220	400.000.000	220	400.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>											

			X	X X	01	2,07	0 0 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1	1.000.000.000	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,07	0 0 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		60	250.000.000	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	X X	01	2,07	0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	200.000.000	-	-	-	-	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,07	0 0 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4	74.000.000	4	88.000.000	4	88.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			X	XX	01	2,08	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		50	500.000	60	600.000	60	600.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,08	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	500.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang

			X	XX	01	2,08	0 0 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		2	21.760.000	2	22.000.000	2	22.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,08	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
			X	XX	01	2,09	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		7	250.000.000	7	250.000.000	7	250.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,09	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	90.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang
			X	XX	01	2,09	0 0 0 1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3	26.840.000	3	95.000.000	3	96.000.000	Sekretariat	Kab. Deli Serdang

Lampiran 6 LHE SAKIP DPMPTSP Kab. Deli Serdang

	PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG INSPEKTORAT Jalan Mawar Nomor 6 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514 Telepon (061) 7951646 Faksimile (061) 7951646 Pos-el: inspektoratdeliserdang@gmail.com Laman: https://inspektorat.deliserdangkab.go.id
Lubuk Pakam, 04 Juli 2025	
Nomor :	700.1.2.1 / LHE. AKIP. 76. 11 / insp / 2025
Sifat :	Biasa
Lampiran :	-
Hal :	Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025
 Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang di- <u>Lubuk Pakam.</u>	
Tim Evaluator telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:	
1. PENDAHULUAN	
a. Dasar Hukum Evaluasi	
1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor :800.1.1/1/DD/72/2025 tanggal 08 April 2025.	
LHE AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang Tahun 2025	
1	

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau evaluasi pelaksanaan SAKIP di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Sasaran evaluasi AKIP adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan pada evaluasi ini adalah

- 1) Pengumpulan Dokumen
- 2) Analisa dan Penilaian
- 3) Pengamatan dan Wawancara

f. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - Sub Koordinator dan Kelompok jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, membawahi:
 - Sub Koordinator dan Kelompok jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:
 - Sub Koordinator dan Kelompok jabatan Fungsional;
- 6) Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya manusia pada bulan Desember tahun 2021 sebanyak 65 orang pegawai yang terdiri dari 40 orang PNS dan 45 orang Non PNS. Sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat baik, hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektoriat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dengan status sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT
1	Membahas secara komprehensif faktor penghambat tidak terlaksanainya target PMA dan menghubungkan dengan isu-isu strategis kekinian sehingga dapat diumpankan solusi pencapaian targetnya	Target Realisasi PMA sudah tercapai	Telah ditindaklanjuti
2	Menetapkan target Perencanaan Kinerja yang menantang dan realistis serta dengan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan.	Dengan menetapkan perjanjian kinerja masing-masing pejabat dan dipertanggung jawabkan didalam aplikasi E-kin	Belum sepenuhnya ditindaklanjuti
3	Menjalankan dengan baik SOP (Standar Operasional Prosedur) mekanisme pengumpulan data kinerja.	Telah dilakukan pengumpulan data dan pertemuan evaluasi kinerja secara berkala (triwulan) sesuai dengan SOP mekanisme pengumpulan data	Telah ditindaklanjuti

4	Menggambarkan dengan jelas dan komprehensif terkait Efisiensi atau penggunaan anggaran yang dilakukan dalam mencapai kinerja.	Menetapkan prioritas program kegiatan yang mendukung kinerja DPMPTSP	Telah ditindaklanjuti
5	Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Dengan mengikuti penilaian mandiri PTSP oleh kementerian investasi /BKPM	Belum terdapat di LKIP
6	Menggambarkan dengan jelas hasil evaluasi SAKIP memberikan manfaat untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.	Seluruh rekomendasi oleh APSP telah menjadi perhatian dan ditindaklanjuti	Seluruhnya ditindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa nilai sebesar 72,56 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/3 unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,36	32,79
2	Pengukuran Kinerja	30,00	29,70	31,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,38	13,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,93	71,55
			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **22,79** dari nilai maksimal **30,00**.

Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa:

a) Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 5,50 dari nilai maksimal 6,00

Dokumen Perencanaan Kinerja DPMPTSP telah tersedia dan diformalkan antara lain :

(1) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan kinerja jangka menengah menggunakan dokumen Draft Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang telah memuat:

(a) Tujuan Renstra dan seluruh tujuan telah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran keberhasilan dan target pencapaiannya.

(b) Sasaran Renstra dan seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran, target jangka menengah dan target tahunan.

(c) Program Renstra dan seluruh program telah dilengkapi dengan kegiatan, kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikator.

(d) Telah dilengkapi dengan dokumen tambahan berupa SK IKU.

(2) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan kinerja jangka pendek menggunakan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang telah memuat:

(a) Seluruh sasaran Renja telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dan target tahunan.

(b) Program Renja dan seluruh program telah dilengkapi dengan kegiatan, kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikator.

(c) Telah dilengkapi dengan dokumen tambahan berupa SK IKU.

(3) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan pada aktivitas yang mendukung kinerja telah melampirkan dokumen pendukung berupa Rencana Aksi, Cascading dan Crosscutting.

(4) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja telah melampirkan data pendukung berupa RKA.

b) Kualitas Dokumen Perencanaan kinerja memperoleh nilai 6,79 dari nilai maksimal 9,00.

Dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) telah diformalkan.

(2) Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) telah dipublikasikan tepat waktu.

(3) Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) telah sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

(4) Ukuran keberhasilan telah sepenuhnya memenuhi unsur SMART.

(5) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah menantang.

Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu :

(1) Target yang ditetapkan untuk "Persentase Realisasi Investasi" diharapkan dapat ditargetkan dengan menantang dan mempengaruhi indikator kinerja daerah yang lain seperti menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

(2) Cascading dan Crosscutting untuk dokumen perencanaan RENSTRA 2025 – 2029 belum dibuat.

c) Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 10,50 dari nilai maksimal 15,00

Dalam pemanfaatan Perencanaan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

(1) Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.

(2) Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

(3) Belum terdapat sepenuhnya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

(4) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **21,90** dari nilai maksimal **30,00**.

Penilaian pengukuran kinerja meliputi 3 sub komponen pengukuran kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja menunjukkan bahwa:

a) Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **5,40** dari nilai maksimal **6,00**.

Dokumen Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- (2) Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- (3) Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b) Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai **6,30** dari nilai maksimal **9,00**.

Kualitas Dokumen Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.

Namun dalam kualitas dokumen pengukuran masih terdapat yang perlu diperhatikan yaitu:

- (1) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- (2) Setiap Bidang belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- (4) Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c) Dalam Pemanfaatan Dokumen Pengukuran Kinerja yang telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

b) Kualitas Dokumen Laporan Kinerja yang telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaan memperoleh nilai **3,05** dari nilai maksimal **4,50**. Pada Kualitas Dokumen Laporan Kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- (2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- (3) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta belum dibahas secara komprehensif.

c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai **4,61** dari nilai maksimal **7,50**.

Pelaporan Kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- (2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- (3) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- (4) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- (5) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- (6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai **17,50** dari nilai maksimal **25,00**

Penilaian evaluasi kinerja meliputi 3 sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa:

a) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 17,50 dari nilai maksimal 25,00.

Pada implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang masih terhadap beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- (1) Sebagian besar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.
- (2) Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP, hal ini disebabkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal belum terdokumentasi dengan baik.
- (3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- (5) Belum sepenuhnya terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dengan baik SOP (Standar Operasional Prosedur) mekanisme pengumpulan data kinerja dan menampilkan bukti dukung.
- 2) Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional atau provinsi (Benchmark Kinerja).
- 3) Merubah data baseline pada Renstra terbaru (2025-2030) serta mengusulkan perubahan terhadap data baseline pada Ranwal RPJMD untuk indikator persentase peningkatan investasi dengan dasar rumus perhitungan yang benar.
- 4) Menetapkan target Perencanaan Kinerja yang menantang dan realistis serta dengan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan dan menampilkan pada Renstra terbaru.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait target pada Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, PK) terbaru kepada seluruh pegawai dan menyampaikan tugas dan target pada masing-masing bidang sehingga Dokumen Perencanaan menjadi kepedulian dan tanggung jawab seluruh pegawai.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 masuk dalam kategori **sangat baik** dengan **predikat 88 (72,56)**. Hasil Evaluasi sudah mendapat kategori sangat baik dan juga nilai pada tahun ini mengalami kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya karena telah ada upaya untuk memperbaiki Renstra 2025-2029.

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

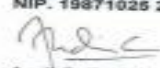
Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG


H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGCAE,
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 198803 1 010

TIM PEMERIKSA :

1. 
Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820312 200502 2 002
2. 
Mulki Ulfansyah, SE
NIP. 19890803 201402 1 003
3. 
Liatra Doloksaribu, S.Kom., M.Si
NIP. 19871025 200903 2 006
4. 
Andi Calla, SH
NIP. 19850426 202012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**MENGETAHUI :
INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG**

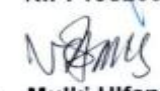


**H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGCAE.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010**

TIM PEMERIKSA :



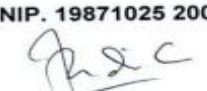
**1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820312 200502 2 002**



**2. Mulki Ulfansyah, SE
NIP. 19890803 201402 1 003**



**3. Listra Doloksaribu, S.Kom.,M.Si
NIP. 19871025 200903 2 006**



**4. Andi Calla,SH
NIP.19850426 202012 1 001**

Tembusan disampaikan Kepada:

Yth. Pj. Bupati Deli Serdang sebagai laporan.

Lampiran 7 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514
Telepon. (061) - 80024154 Faks. (061) - 7955885
Pos-el : perizinan@deliserdangkab.go.id Laman : pertanin.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 3 Desember 2025

Nomor : 000.8.b.3/1699/DPMPTSP-05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran: Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Inspektur Kabupaten Deli Serdang
di
Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang nomor 700.1.2.1/LHE-AKIP.76.11/INS/2025 tanggal 4 Juli 2025, perihal Penyampaian Hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 (terlampir).
Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang



Drs. Hendri Wijaya
Pembina Utama Muda
NIP. 19691213 199010 1 002

Tindak Lanjut
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LHE AKIP) Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

Menindaklanjuti Surat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor 700.1.2.1/LHE_AKIP.76.11/INS/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi terhadap implementasi AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 memperoleh nilai 72,56 dengan predikat BB (Sangat Baik). Meskipun telah memperoleh kategori sangat baik, masih terdapat beberapa komponen yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang beserta tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1.	Menjalankan dengan baik SOP (Standar Operasional Prosedur) mekanisme pengumpulan data kinerja dan	Telah dilakukan pengumpulan data kinerja sesuai SOP dan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja secara berkala (triwulan)	- SOP Pengumpulan Data Kinerja - Notulen rapat - Daftar Hadir Rapat - Laporan Evaluasi https://drive.google.com/drive/folders/1QIM-6z8j68tkQ8gq0TvtGRc9d_jmaCZL?usp=drive_link

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung	
	menampilkan bukti dukung		Kinerja Triwulan	
2.	Menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional atau provinsi (Benchmark Kinerja)	Telah dilakukan pengumpulan dan penyajian data perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tingkat provinsi sebagai bahan analisis kinerja	- Data Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Utara - Dokumen LKjIP/LKPJ yang memuat perbandingan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1EvZEo2ISn6G50vFvWhNYJAr8uvlsZG1Qbg?usp=drive_link
3.	Merubah data baseline pada Renstra terbaru (2025-2029) serta mengusulkan perubahan terhadap data baseline pada Ranwal RPJMD untuk indikator persentase peningkatan investasi dengan dasar rumus perhitungan yang benar.	Telah dilakukan penyesuaian data baseline dan rumus perhitungan indikator persentase peningkatan investasi pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 serta penyampaian usulan penyesuaian kepada perangkat daerah terkait dalam penyusunan Ranwal RPJMD	- Renstra DPMPTSP 2025-2029 - Berita Acara Revisi - Dokumen Ranwal RPJMD (draft)	https://drive.google.com/drive/folders/1Hurd8WvEhZEfeHVR0Xgn014-teS61r8?usp=drive_link
4.	Menetapkan target Perencanaan Kinerja yang manantang dan realistis serta dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan menampilkan pada Renstra terbaru	Telah ditetapkan target perencanaan kinerja yang manantang dan realistis berdasarkan capaian historis, potensi daerah, serta kebijakan pemerintah daerah, dan dituangkan dalam Renstra terbaru	- Renstra DPMPTSP 2025-2029 - Matriks Target Kinerja - Dokumen Perjanjian Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1SvTJdQz89DUcBmGpiWRn2gdUUFY56kH9?usp=drive_link
5.	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait target pada Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, PK) terbaru kepada seluruh pegawai dan menyampaikan tugas dan target pada masing-masing bidang sehingga Dokumen Perencanaan menjadi kepedulian dan tanggung jawab seluruh pegawai.	Telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dokumen perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai dan penyampaian pembagian tugas serta target kinerja pada masing-masing bidang	- Undangan Sosialisasi - Daftar Hadir Pegawai - Notulen Kegiatan - Dokumen PK Berjenjang	https://drive.google.com/drive/folders/1UlrMQZP-Gb8lg4-JLpKGCQWxQgBASPEk?usp=drive_link

Demikian disampaikan tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang



Drs. Honda Wijaya
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19691213 199010 1 002

Lampiran 8. Realisasi Investasi PMDN dan PMA

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN PER SEKTOR KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2025

No	Sektor	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Total		
		Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek
1	Hotel dan Restoran	1.312	706	18	10.720	19	41	8.904	22	54	70.290	119	54.00	91.302	866	167
2	Industri Berang dan Kulit dan Ales Kaki	-	-	0	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0	-	2
3	Industri Karet dan Plastik	4.445	48	50	18.771	15	37	102.142	76	42	41.877	167	45.00	167.034	308	174
4	Industri Kayu	1.527	6	21	4.457	57	40	1.306	54	35	311	164	31.00	7.800	281	129
5	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi	13	6	2	514	4	4	13	3	3	113	18	4.00	652	31	13
6	Industri Kertas dan Peretakan	9.397	27	10	2.531	21	14	164.703	39	18	14.906	86	14.00	191.557	153	54
7	Industri Kimia Dan Farmasi	7.528	14	41	10.999	23	75	105.771	186	78	49.938	89	86.00	174.239	292	260
8	Industri Lainnya	72	12	38	23.034	15	62	473	24	54	3.964	29	54.00	27.545	80	208
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	15.638	1.094	50	73.301	236	65	14.798	75	58	53.294	112	55.00	158.031	1.517	228
10	Industri Makanan	66.973	90	167	83.734	98	209	703.978	575	180	488.380	1.034	206.00	1.343.071	2.406	778
11	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1.902	2	-	1.270	6	30	202	8	28	55.292	-	36.00	58.666	16	92
12	Industri Mineral Non Logam	43.096	91	29	44.667	2	42	28.375	31	36	2.730	-	26.00	119.889	124	133
13	Industri Tekstil	0	-	1	0	-	2	0	-	1	-	-	0	0	-	4
14	Jasa Lainnya	93.966	441	71	18.800	470	129	105.316	804	85	45.181	642	86.00	263.263	2.307	363
15	Kehutanan	0	-	1	3.200	1	3	250	-	1	5	-	1.00	3.452	1	6
16	Konstruksi	550.675	38	195	51.668	43	341	9.594	17	215	112.251	45	292.00	724.286	143	1.043
17	Listrik, Gas dan Air	1.202	-	13	3.482	-	14	344	-	10	6.768	15	24.00	11.796	15	61
18	Perdagangan dan Reparasi	192.103	288	410	63.173	512	670	95.691	227	829	51.825	679	610.00	402.760	1.703	2.525
19	Perikanan	0	-	2	250	-	9	0	-	7	35	-	3.00	285	-	21
20	Perambangan	13	2	4	6	-	10	0	3	4	500	-	2.00	520	5	20
21	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	110.916	4	42	33.952	19	52	38.336	20	69	30.285	12	99.00	213.481	58	262
22	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	55.838	147	37	52.992	183	45	190.237	630	75	143.022	203	78.00	412.090	1.363	233
23	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	35.062	367	103	39.534	183	146	246.854	255	156	468.523	115	108.00	790.323	1.020	573
Total		1,193,298	3,389	1,305	541,094	1,907	2,843	1,767,500	3,329	2,086	1,639,260	4,189	1,962	5,161,652	12,734	7,369

Target Investasi PMDN Tahun 2025 = Rp. 4.760.873.520.000,-
 Realisasi investasi PMDN Tahun 2025 = Rp 5.363.551.807.687,-
 Capaian Target Investasi PMDN tahun 2025 = 108 %

Kepala Dinas Pengawasan Modal dan
 Revisi Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Deli Serdang
 Drs. Hendra Wijaya
 Kepala Utama Muda
 NIP. 196912131990101002

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA PER SEKTOR KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2025

No	Sektor	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Total		
		Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Investasi Rp (Juta)	Tenaga Kerja	Proyek
1	Hotel dan Restoran	136	8	4	132	6	4	132	15	16	10.105	20	16	10.505	47	42
2	Industri Karet dan Plastik	47.526	142	17	82.765	142	13	17.804	329	21	18.059	1087	21	166.155	1.680	72
3	Industri Kayu	300	11	7	0	-	7	1.090	10	9	0	0	4	1.390	21	27
4	Industri Kertas dan Peretakan	0	1	1	132	-	1	45	4	1	77.646	29	4	78.025	34	7
5	Industri Kimia Dan Farmasi	668.276	49	21	344.387	19	28	1.761.773	178	32	52.411	7	27	2.827.347	255	118
6	Industri Lainnya	439	7	6	0	-	8	2.758	-	12	0	0	0	3.197	7	28
7	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	7	-	5	15	14	8	89	-	8	257	2	7	348	16	24
8	Industri Makanan	2.788	20	37	39.560	41	38	103.159	14	51	359.269	63	44	504.796	138	170
9	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	0	1	2	0	38	3	0	23	1	0	172	2	0	224	8
10	Industri Mineral Non Logam	189.272	-	4	0	-	4	20.070	-	6	6.109	0	3	215.481	-	17
11	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	0	0	0	-	1
12	Jasa Lainnya	115	4	14	19	4	9	1.082	-	13	34	0	9	1.250	8	45
13	Kehutanan	120	-	1	0	-	2	0	-	-	0	0	0	120	-	3
14	Konstruksi	0	-	1	0	-	1	0	-	7	0	0	19	0	-	27
15	Listrik, Gas dan Air	0	1	4	34	12	4	20	-	4	0	0	3	54	13	15
16	Perdagangan dan Reparasi	11.144	55	83	8.047	15	69	19.845	57	98	1.990	70	72	41.028	197	322
17	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	20.083	-	5	9.880	-	6	13.399	-	5	8.856	0	5	52.217	-	21
18	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4.368	1	14	7.905	-	14	5.359	-	24	192	0	13	17.853	1	65
19	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	761	9	13	31.549	8	24	21.848	3	28	42.534	30	22	96.790	50	87
Total		945.334	307	248	825.058	289	241	1.968.450	633	337	577.688	1.460	270	4.016.825	2.689	1.097

Target investasi PMA Tahun 2025 = Rp. 2.272.327.320.000,-
 Realisasi investasi PMA Tahun 2025 = Rp 4.016.525.478.405,-
 Capaian Target Investasi PMA tahun 2025 = 177 %

Kepala Dinas Pengawasan Modal dan
 Revisi Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Deli Serdang
 Drs. Hendra Wijaya
 Kepala Utama Muda
 NIP. 196912131990101002

Lampiran 9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025	
NILAI IKM 87,4	NAMA LAYANAN : RESPONDEN JUMLAH : 2749 JENIS KELAMIN : L : 591 Orang P : 2158 Orang PENDIDIKAN : SD : 1 Orang SMP : 2 Orang SMA : 191 Orang DIII : 0 Orang S1 : 2328 Orang S2 : 220 Orang S3 : 7 Orang PERIODE SURVEI 02 JANUARI 2025 s/d 31 DESEMBER 2025
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT	

Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2025

BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN LKPM MELALUI SISTEM OSS UNTUK PELAKU USAHA DELI SERDANG DI AULA BAPENDA



PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA (OSS)



KUNJUNGAN TIM OPTIMALISASI REALISASI INVESTASI



SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA (OSS), PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (SERI DELI) UNTUK KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN DI KABUPATEN DELI SERDANG



PENGAMBILAN VIDEO POTENSI UNGGULAN DAERAH DI 22 (DUA PULUH DUA) KECAMATAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Pengambilan video potensi unggulan daerah ini bertujuan agar semua potensi unggulan daerah di 22 (dua puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dapat ditampilkan dalam video potensi unggulan daerah untuk meningkatkan promosi Investasi Kabupaten Deli Serdang.



MENGIKUTI KEGIATAN PAMERAN PEKAN INOVASI DAN INVESTASI SUMATERA UTARA (PIISU) KE-11 TAHUN 2025 DI ISTANA MAIMUN JL. BRIGJEND KATAMSO KEL. AUR KEC. MEDAN MAIMUN

Kegiatan Pameran Pekan Inovasi dan Investasi (PIISU) yang ke-11 ini bertujuan untuk mempromosikan dan memberikan informasi tentang potensi daerah dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Deli Serdang, mensosialisasikan Aplikasi yang berisi potensi daerah “Si-Informan” yang ada di website <https://perizinan.deliserdangkab.go.id/>. Dan melayani pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang. Pada acara pembukaan kegiatan PIISU dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Deli Serdang dan didampingi oleh Kepala Dinas Perangkat Daerah terkait.



MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI POTENSI UNGGULAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

KECAMATAN SIBOLANGIT



KECAMATAN GALANG



KECAMATAN BANGUN PURBA



KECAMATAN PANTAI LABU

